

**SKRIPSI**

**ANALISIS PROSES ADVOKASI INTERNASIONAL IPT65 SEBAGAI  
JEJARING ADVOKASI TRANSNASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
PADA TAHUN 2015-2016**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hubungan  
Internasional Pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dengan Minat Utama

*Security and Conflict*

Oleh :

Firda Tazkiardini

105120401111023



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**ANALISIS PROSES ADVOKASI INTERNASIONAL IPT65 SEBAGAI  
JEJARING ADVOKASI TRANSNASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
PADA TAHUN 2015-2016**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh :

**FIRDA TAZKIARDINI**

105120401111023

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

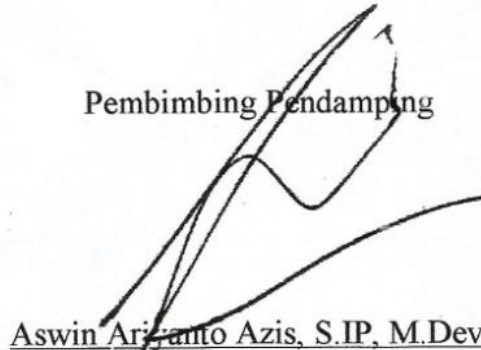
Tanggal 21 Desember 2017

Pembimbing Utama



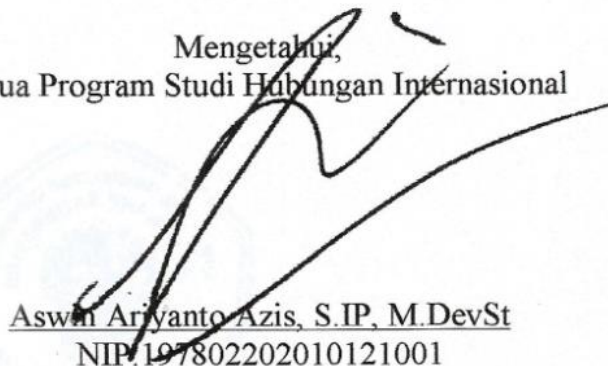
enny Rosalinda, S.IP, M.A  
NIP.197908082014042001

Pembimbing Pendamping



Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M.DevSt  
NIP.197802202010121001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hubungan Internasional



Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M.DevSt  
NIP.197802202010121001

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS PROSES ADVOKASI INTERNASIONAL IPT65 SEBAGAI JEJARING ADVOKASI TRANSNASIONAL HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2015-2016

#### SKRIPSI

Disusun Oleh :

FIRDA TAZKIARDINI

105120401111023

Telah dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana pada Tanggal 21 Desember 2017

Ketua Majelis Penguji



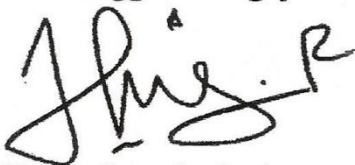
Mely Noviryani, S.Sos, M.A  
NIK.2007077409112001

Sekretaris Majelis Penguji



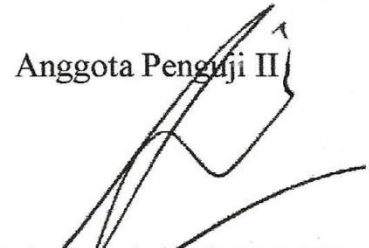
Wishnu Mahendra Wiswayana, S.IP, M.Si  
NIK.2017108906281001

Anggota Penguji I



Henny Rosalinda, S.IP, M.A  
NIP.197908082014042001

Anggota Penguji II



Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M.DevSt  
NIP.197802202010121001

Malang, 21 Desember 2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Unti Budigdo, S.E, M.Si, Ak.  
NIP.196908141994021001

**LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama : Firda Tazkiardini

NIM : 105120401111023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PROSES ADVOKASI INTERNASIONAL IPT65 SEBAGAI JEJARING ADVOKASI TRANSNASIONAL HAK ASASI MANUSIA PADA TAHUN 2015-2016”** adalah benar-benar hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut

Malang, 14 Desember 2017

Pembuat pernyataan

Firda Tazkiardini

105120401111023



## LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dan menulis lembar persembahan ini. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada keluarga penulis terutama kedua orang tua penulis. Kepada ayahanda Eddie Bakhtyar Evendie dan mama Diah Wahyuni yang tidak pernah lelah mendukung, mengingatkan, dan mendoakan setiap harinya. Serta kepada adik-adik tercinta, Galuh Aulia Ardini yang selalu menginspirasi, Hilma Maulidya Ardini yang selalu menjadi saksi ketika penulis lelah dan dengan terpaksa tidur bersama berbagai kertas revisian penulis (hehe), dan Imityaaz Luthfiyyah Ardini yang selalu menjadi penghibur penulis. *Love you all fams!*

Ucapan terimakasih penulis berikan kepada sahabat dan teman-teman terbaik penulis yang selalu ada, menemani, berjuang bersama dan mendukung penulis, Kak Li Riski Amalia atas *support* nya yang besar hingga saat ini, Sonny Satyabhakti, Kanya, Alak, Dian, Halla, Susan, Sun-sun. Enggar, Intan, Ipeh, Momo yang selalu sabar dan tidak pernah bosan bersedia menemani di gazebo perpustakaan, perpustakaan fisip dan tempat lainnya untuk berjuang bersama. Seluruh teman-teman HI'10 dan seluruh sivitas prodi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya.

Serta penulis sampaikan terimakasih kepada SBSquad Entertainment yang menjadi tempat 'pelarian' penulis disaat suntuk. Mbak Risma, mbak Adis, mbak Retchan, Kikik yang selalu membantu penulis dalam memahami jurnal-jurnal. Seluruh anggota SBSquad lainnya, Evien, Nop, Danis, Amik, Rethak, Poppy, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teman-teman KIRIN Crew yang telah bersedia direpotkan oleh penulis, mbak Rina dan Ibuk yang sudah baik hati mengizinkan dan memberi kesempatan penulis untuk belajar menghadapi dunia kerja.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Bu Henny dan Pak Aswin yang tidak pernah lelah mendukung, secara sabar serta tegas membimbing penulis dan membantu untuk menyelesaikan tulisan ini.

Penulis,  
Firda Tazkiardini



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Proses Advokasi Internasional IPT65 Sebagai Jejaring Advokasi Transnasional Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2015-2016”**. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis dibantu oleh berbagai pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih pada:

1. Kedua orang tua, adik-adik beserta keluarga besar lainnya;
2. Bapak Prof.Dr.Uni Ludigdo,S.E, M.Si,Ak selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya;
3. Bu Henny Rosalinda, S.IP, MA selaku dosen pembimbing dan pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, dan dorongan agar penulis menyelesaikan skripsi ini;
4. Pak Aswin Ariyanto Azis, S.IP, MdevSt selaku dosen pembimbing dua yang senantiasa memberikan dorongan, kemudahan, dan masukan agar segera menyelesaikan skripsi ini;
5. Bu Mely Noviryani, S.Sos., MA selaku ketua majelis penguji yang memberikan masukan agar skripsi ini lebih baik;
6. MasWisnu Mahendra Wiswayana, S.IP., M.Si selaku sekretaris majelis penguji yang telah memberikan pemahaman lebih mendalam terkait dengan skripsi;

7. Seluruh dosen program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah membagikan ilmu kepada penulis;
8. Mas Kholis, Mas Dadang, Mbak Elisa, dan Mas Andik yang telah membantu proses administrasi selama masa kuliah berlangsung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itulah penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata, Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat pada tahun-tahun mendatang.

Malang, 14 Desember 2017

Penulis





## ABSTRAKSI

**Firda Tazkiardini. 105120401111023. 2017. Analisis Proses Advokasi Internasional IPT65 Sebagai Jejaring Advokasi Transnasional Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2015-2016**

---

Peristiwa G30SPKI merupakan peristiwa dimana terdapat sekelompok orang yang ingin menggantikan ideologi negara dengan paham lain yaitu komunisme oleh PKI. Penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal militer di lubang buaya menjadi titik balik dari peristiwa ini. Peristiwa ini dapat dikategorikan kedalam kejahatan kemanusiaan. Dan hal ini tidak banyak dibahas bahkan pemerintah Indonesia tidak terbuka akan hal ini khususnya pada masa Orde Baru. Setelah lengsernya Presiden Soeharto atau runtuhnya masa Orde Baru menjadi Reformasi, peristiwa 1965 kembali mencuat seperti salah satunya yang dilakukan oleh IPT65 (*International People's Tribunal/* Pengadilan Rakyat Internasional 1965). Munculnya IPT65 sendiri karena tidak puas dengan pemerintah Indonesia yang bungkam atau hanya menjanjikan untuk membuka peristiwa 1965. Untuk Itu IPT65 mencoba untuk menegakkan hak para korban dengan cara melakukan advokasi menggunakan *Transnational Advocacy Network*. Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses advokasi IPT65 menggunakan *Transnational Advocacy Network*.

*Kata kunci : IPT65, PKI, Transnasional Advocacy Network*

## ABSTRACT

**Firda Tazkiardini. 105120401111023. 2017. IPT65 International Advocacy Process Analysis as a Transnational Advocacy Network for Human Rights in 2015-2016**

---

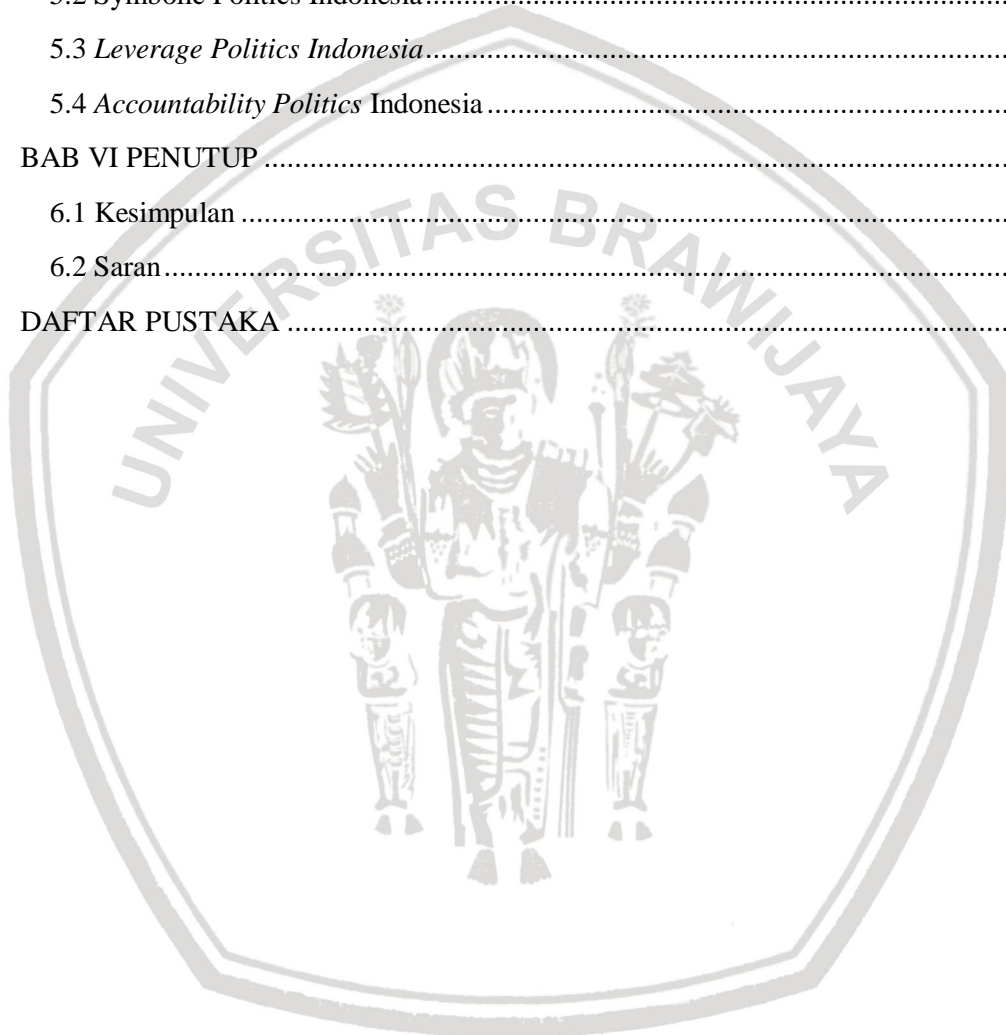
The G30SPKI event is an event where there is a group of people who want to replace the state ideology with another understanding, namely communism by the PKI. The kidnapping and killing of several military generals in the crocodile hole was the turning point of this event. This event can be categorized into crimes against humanity. And this was not much discussed even the Indonesian government was not open to this, especially during the New Order era. After the fall of President Soeharto or the collapse of the New Order era into Reformation, the 1965 event resurfaced as one of them was carried out by the IPT65 (International People's Tribunal 1965). The emergence of IPT65 itself was not satisfied with the silence of the Indonesian government or only promised to open the events of 1965. For that reason, IPT65 tried to uphold the rights of victims by advocating using the Transnational Advocacy Network. This study explains how the IPT65 advocacy process uses the Transnational Advocacy Network.

*Keywords : IPT65, PKI, Transnasional Advocacy Network*

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN .....   | ii                                  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI.....   | iv                                  |
| LEMBAR PERSEMBAHAN .....   | v                                   |
| KATA PENGANTAR.....  | vii                                 |
| ABSTRAKSI .....  | ix                                  |
| ABSTRACT .....   | x                                   |
| DAFTAR ISI .....   | xi                                  |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xiii                                |
| DAFTAR SINGKATAN.....  | xiv                                 |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1                                   |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....   | 1                                   |
| 1.2 Rumusan permasalahan .....   | 9                                   |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....   | 9                                   |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....  | 10                                  |
| BAB II KERANGKA TEORI .....  | 11                                  |
| 2.1 Studi Terdahulu .....  | 11                                  |
| 2.2 Konsep Transnational Advocacy Network .....  | 16                                  |
| 2.3 Operasionalisasi Konsep.....   | 21                                  |
| 2.4 Alur Pemikiran .....   | 25                                  |
| 2.5 Argumen Utama .....  | 26                                  |
| BAB III METODE PENELITIAN .....  | 28                                  |
| 3.1 Jenis Penelitian.....  | 28                                  |
| 3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....  | 28                                  |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data.....   | 28                                  |
| 3.4 Teknik Analisa Data .....  | 29                                  |
| 3.5 Sistematika Penulisan .....  | 29                                  |
| BAB IV SEJARAH PELANGGARAN HAM TRAGEDI G30S-PKI 1965 DAN AWAL MULA TERBENTUKNYA IPT65..... | 32                                  |
| 4.1 Aspek Historis Kasus Pelanggaran HAM Tragedi 1965 .....                                | 32                                  |

|   |    |
|---|----|
| 4.1.1. Gestapu/G30S-PKI ( <i>Gerakan 30 September</i> ) atau Gestok ( <i>Gerakan Satu Oktober</i> ) pada Tahun 1965 Menjadi Titik Balik Transisi Kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru | 33 |
| 4.2 Benih-Benih Koalisi Masyarakat Hingga Akhirnya Membuka Isu Ini Kembali di Level Internasional .....   | 46 |
| BAB V ANALISIS <i>TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS</i> KORBAN PELANGGARAN HAM TRAGEDI G30SPKI OLEH IPT65.....  |    |
| 5.1 <i>Information Politics Indonesia</i> .....   | 55 |
| 5.2 <i>Symbolic Politics Indonesia</i> .....  | 63 |
| 5.3 <i>Leverage Politics Indonesia</i> .....  | 65 |
| 5.4 <i>Accountability Politics Indonesia</i> .....  | 67 |
| BAB VI PENUTUP .....  |    |
| 6.1 Kesimpulan .....  | 69 |
| 6.2 Saran.....  | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 75 |



## DAFTAR GAMBAR

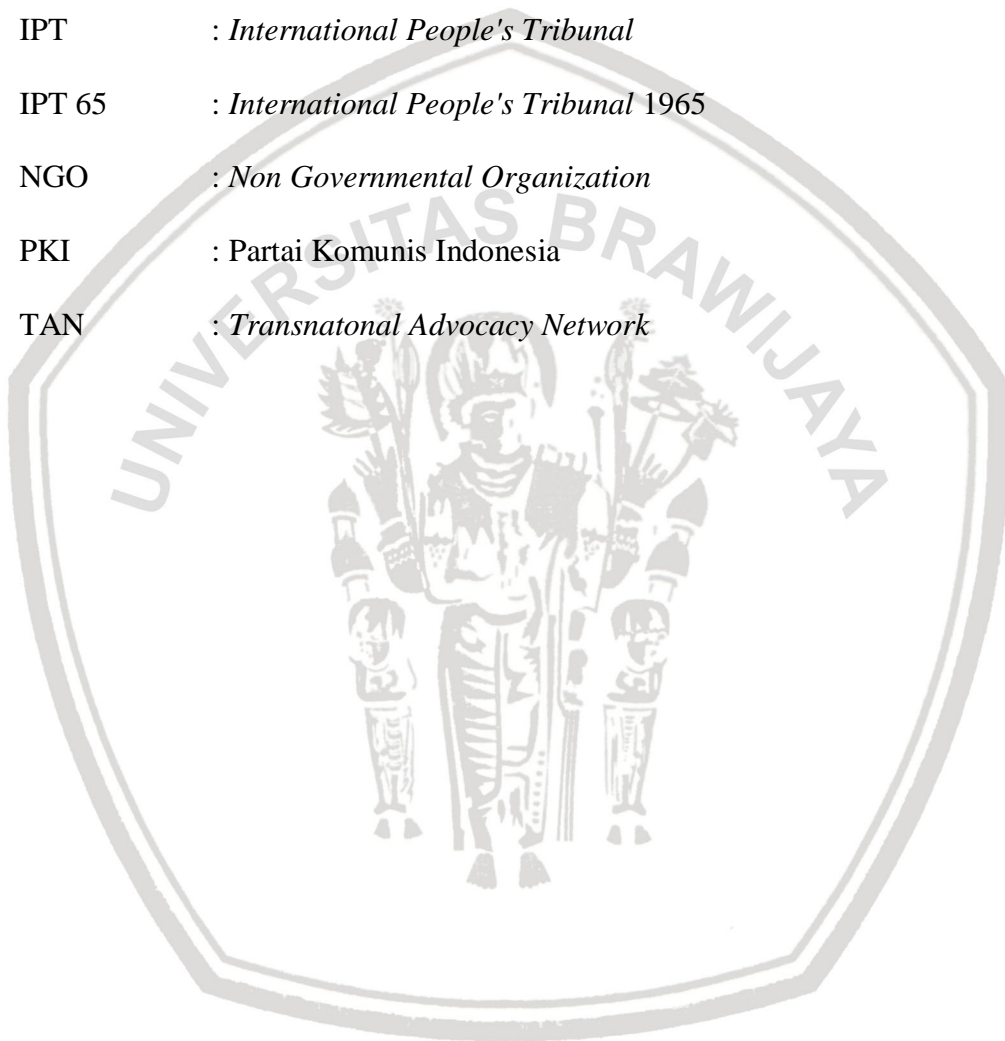
|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Skema keterlibatan Amerika Serikat dalam tragedi 1965 ..... | 7  |
| Gambar 2. 2 Alur <i>Boomerang Pattern</i> .....                         | 18 |
| Gambar 5. 1 Media Informasi Politik dari IPT65 .....                    | 62 |





## DAFTAR SINGKATAN

|          |  |
|----------|--|
| G30S     | : Gerakan 30 September                           |
| G30S/PKI | : Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia |
| HAM      | : Hak Asasi Manusia                              |
| IPT      | : <i>International People's Tribunal</i>         |
| IPT 65   | : <i>International People's Tribunal 1965</i>    |
| NGO      | : <i>Non Governmental Organization</i>           |
| PKI      | : Partai Komunis Indonesia                       |
| TAN      | : <i>Transnational Advocacy Network</i>          |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

*International People's Tribunal 1965* untuk pertama kali muncul secara publik ketika diselenggarakannya sidang di Den Haag, Belanda tahun 2015 lalu.<sup>1</sup> Fokus dari *International People's Tribunal 1965* (Pengadilan rakyat internasional) ini adalah tentang pengakuan HAM atas kasus kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM di tahun 1965. Gagasan untuk menyelenggarakan pengadilan rakyat internasional ini yaitu sebagai respon terhadap aksi G30S dan peristiwa setelahnya, 1 Oktober 1965.<sup>2</sup> Peristiwa tersebut tidak diketahui secara luas dan di Indonesia sendiri, peristiwa ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, cenderung disembunyikan.

Isu ini kembali diangkat sejak jatuhnya rezim pemerintahan Soeharto dan tidak adanya respon dari pemerintah hingga kemudian munculnya organisasi-organisasi atau gerakan masyarakat yang ingin menegakkan HAM para korban tragedi 1965. Salah satunya adalah peluncuran film dokumenter di festival film internasional di Den Haag, Belanda yaitu film milik Johua Oppenheimer "*The Act Of Killing*" tahun 2013.<sup>3</sup> Film ini kemudian memecah kesunyian internasional dan membuka suatu forum diskusi yang dihadiri oleh 35 orang korban pengasingan PKI, Sutradara film "*The Act Of Killing*", mantan anggota Komisi Hak Asasi

---

<sup>1</sup> International People's Tribunal 1965. "*Apa itu IPT 1965?*". (Online) diakses pada 20 November 2017 melalui <http://www.tribunal1965.org/apa-itu-ipt-1965/>

<sup>2</sup> International People's Tribunal 1965, "*Narrative Report of the IPT1965*", (Online) diakses pada 1 Desember 2017 <http://www.tribunal1965.org/en/narrative-report-of-the-ipt-1965/>

<sup>3</sup> *Ibid.*

Manusia Indonesia, beberapa aktivis , jurnalis dan peneliti untuk membahas bagaimana mengakhiri impunitas para korban pelanggaran HAM 1965.<sup>4</sup>

Kegagalan negara untuk menemukan solusi internal Indonesia dalam menegakkan hak asasi korban pelanggaran HAM 1965 ini, membuat para organisasi dan gerakan masyarakat memutuskan bahwa perlu diadakannya suatu tekana internasional bagi pemerintah Indonesia untuk menghentikan keheningan dan stigma masyarakat terkait pelanggaran HAM 1965 selama ini.<sup>5</sup> Dari pertemuan diskusi yang telah disebutkan sebelumnya, para peserta diskusi memutuskan bentuk tekanan untuk pemerintah Indonesia adalah sebaiknya melalui *International People's Tribunal* (IPT).<sup>6</sup> Sebelumnya pernah diadakan pengadilan serupa di Rwanda yaitu *International Criminal Tribunal for Rwanda*, *International Tribunal for The Law of The Sea* dan *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*.

Indonesia sebagai negara memiliki tanggung jawab menyelidiki sejauh mana kejahatan ini, mengadili pelaku dari semua tingkatan tanpa memandang bulu, mengajukan permintaan maaf resmi dan memberikan pemulihan bagi para korban dan keluarga mereka. Pemerintah Indonesia telah gagal dalam menghentikan kekebalan para pelaku pelanggaran HAM 1965 dan memperbaiki stigma masyarakat. Di Indonesia, pembahasan tentang peristiwa 1965 ini menjadi tabu dan jarang untuk dibicarakan meskipun banyak korban yang menderita, dan tidak adanya respon dari pemerintah. Hal ini yang kemudian menginisiasi organisasi atau gerakan masyarakat penegak hak asasi manusia untuk membangun jaringan di ranah internasional. Yaitu dengan membentuk sebuah kepanitiaan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

berbasis internasional dimana tidak hanya menghimpun kekuatan domestik tetapi juga secara internasional dengan melibatkan aktivis dan peneliti dari luar.

Peristiwa kejahatan kemanusiaan 1965 diakui oleh Amerika Serikat sebagai salah satu pembunuhan massal terburuk abad ke-20 dan menghasilkan banyak yang menjadi korban kematian.<sup>7</sup> Pada tahun 1966, pembunuhan yang dilakukan oleh tentara dan milisi setempat, yang diberi perintah untuk membunuh komunis yang dicurigai oleh Jenderal Suharto, membunuh setidaknya 500.000 orang atau lebih, yang kebanyakan tidak berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain eksekusi di luar hukum, korban pembersihan anti-komunis mengalami penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, kerja paksa, pengusuran paksa, dan penahanan sewenang-wenang.

Pembantaian yang sekarang dikonfirmasi oleh para diplomat Amerika Serikat dan rekan-rekan Departemen Luar Negeri mereka di Washington, menargetkan anggota partai komunis, aktivis mahasiswa, intelektual, serikat buruh, progresif, seniman, tokoh masyarakat, aktivis hak-hak perempuan, dan etnis Tionghoa.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> International People's Tribunal 1965, *"New Documents Reveal US Complacency in Indonesian Massacres"*, (Online) diakses pada 1 Desember 2017 <http://www.tribunal1965.org/en/new-documents-reveal-us-complacency-indonesian-massacres/>

<sup>8</sup> ibid

Partai Komunis Indonesia (PKI) telah didirikan sejak tahun 1914 oleh H.J.F.M. Sneevliet, seorang insinyur Belanda yang menjadikan PKI sebagai partai komunis tertua di dunia.<sup>9</sup> Partai ini kemudian dipimpin oleh D. N. Aidit dan memiliki jumlah pengikut yang semakin meningkat di tiap tahunnya. Dengan banyaknya jumlah pengikut menjadikan PKI sebagai partai politik terkuat di Indonesia pada masa itu. Hal ini kemudian yang mendorong D. N. Aidit untuk mengeliminasi Presiden Soekarno beserta seluruh kebijakannya.

Diantara bulan Oktober tahun 1965 hingga Maret 1966 telah terjadi peristiwa pembantaian massal pasca Gerakan 30SPKI. Tragedi kemanusiaan ini memakan sekitar 500.000 korban yang diduga sebagai anggota PKI.<sup>10</sup> Namun peristiwa ini mendapat sedikit perhatian dari dunia internasional, karena pemerintahan Indonesia menutup sedikit banyak fakta tragedi ini. Peristiwa ini juga menjadi pertanda peralihan masa pemerintahan orde lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno menuju pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Peristiwa pelanggaran HAM 1965 ini menjadi masa transisi menuju pemerintahan orde baru dimana Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan hingga mengakibatkan jatuhnya era pemerintahan Soekarno dan selanjutnya pemerintahan dipimpin oleh Soeharto. Indonesia kemudian dikuasai oleh tentara-tentara dibawah komando Soeharto. Seluruh masyarakat Indonesia dihantui ketakutan yang mencekam. Pembantaian dimulai pada Oktober 1965 dimulai dari Ibu Kota Jakarta, yang kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur,

---

<sup>9</sup> CIA. *The Communist Party Of Indonesia*, halaman: 2

<sup>10</sup> Robert Cribb, *Genocide in Indonesia, 1965-1966*, halaman: 4.



Sumatera dan Bali.<sup>11</sup>

Masyarakat Indonesia yang merupakan anggota PKI maupun yang diduga sebagai orang PKI ditangkap dan dibunuh oleh tentara angkatan darat, bahkan muncul ribuan *vigilante* (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) juga ikut melakukan pembantaian ini.<sup>12</sup> Propaganda militer mulai disebarkan dan berhasil meyakinkan masyarakat Indonesia dan dunia Internasional bahwa penyebab dari munculnya pembantaian ini adalah PKI. Meskipun PKI melakukan penyangkalan hal tersebut tidak berpengaruh terhadap situasi yang terjadi. Alhasil muncul ketegangan dan kebencian di Indonesia. Pemimpin-pemimpin PKI ditangkap bahkan beberapa dihukum mati dan markas PKI di Jakarta di bakar oleh angkatan bersenjata.

Selama pemerintahan Soeharto, peristiwa pembantaian massal 1965-1966 ini tidak pernah disinggung. Soeharto membentuk propaganda ingatan sosial sedemikian rupa sehingga banyak masyarakat Indonesia banyak yang melupakan peristiwa pembantaian ini.

Rezim Soeharto menggunakan setiap media yang ada untuk menyebarkan cerita tentang kekejaman PKI, seperti salah satunya pembuatan film tentang pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat yang berjudul *Pengkhianatan Gerakan 30 September/PKI*.<sup>13</sup> Usaha pembuatan ingatan sosial ini semakin digencarkan dengan pembuatan monumen, museum, upacara, film, dan buku-buku teks agar masyarakat Indonesia mengingat Gerakan 30 September, tetapi

---

<sup>11</sup> Lensa Indonesia, "G30S Pembantaian Masal 1965-1966", (Online) diakses pada 16 Juni 2017 <http://www.lensaIndonesia.com/2012/07/30/inilah-detik-detik-pembantaian-massal-1965-1966.html>

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> John Roosa, Ayu Ratih & Hilmar Farid, *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*, halaman: 12.

melupakan peristiwa pembantaian massal yang terjadi sesudahnya.<sup>14</sup> Salah satu alasan masyarakat Indonesia tidak banyak mengetahui tentang peristiwa genosida ini adalah dikarenakan adanya sensor negara, yang secara hukum melarang para korban untuk menulis atau berbicara di publik.<sup>15</sup>

Pada bulan Desember 2014, Senator Amerika Serikat Tom Udall, memberitahukan sebuah resolusi di Senat Amerika Serikat tentang peristiwa pembantaian 1965-1966.<sup>16</sup> Dalam resolusi tersebut mencatat bahwa enam jenderal Angkatan Darat Indonesia dibunuh oleh personil militer, termasuk anggota pengawal presiden Indonesia dan peristiwa pembunuhan tersebut dilimpahkan pada Partai Komunis Indonesia yang sekaligus diberi label ‘percobaan kudeta komunis’.<sup>17</sup> Catatan milik Tom Udall mencatat bahwa sebagian besar korban pembantaian presiden Soeharto adalah warga sipil yang tidak bersenjata. Di dalam resolusi tersebut, Udall juga menyatakan Amerika Serikat secara sadar memberika bantuan militer, keuangan dan logistik selama peristiwa pembantaian ini berlangsung.<sup>18</sup>

Militer Indonesia telah menanggapi seruan para aktivis penegak hak asasi manusia untuk meningkatkan transparansi seputar pembunuhan massal 1965. Pemerintah Amerika Serikat telah membuat sejumlah besar dokumen dan informasi publik yang menjelaskan hubungan luar negeri Amerika Serikat dengan Indonesia pada pertengahan tahun 1960an.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman: 17

<sup>16</sup> International People’s Tribunal 1965, “*New Documents Reveal US Complacency in Indonesian Massacres*”, (Online) diakses pada 1 Desember 2017 <http://www.tribunal1965.org/en/new-documents-reveal-us-complacency-indonesian-massacres/>

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid..*

Amerika Serikat juga memberikan dukungan material rahasia dalam kasus pembunuhan massal 1965. Melalui telegram yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di tahun 2011, mengungkapkan bahwa pada bulan Oktober 1965 Amerika Serikat telah memasok peralatan telekomunikasi ke militer Indonesia untuk memfasilitasi serangannya dan di bulan Desember Amerika Serikat memindahkan dana sekitar lima puluh juta rupiah ke skuad Kap-Gestapu yang disponsori oleh militer.<sup>20</sup>

**Gambar 1. 1 Skema keterlibatan Amerika Serikat dalam tragedi 1965**



Sumber: International People's Tribunal 1965, *"New Documents Reveal US Complicity in Indonesian Massacres"*

<sup>20</sup> International People's Tribunal 1965, *"Telegrams confirm scale of US complicity in 1965 genocide"*, (Online) diakses pada 1 Desember 2017 <http://www.tribunal1965.org/en/telegrams-confirm-scale-us-complicity-1965-genocide/>

Tidak hanya Amerika Serikat, pengadilan internasional juga menemukan bahwa Australia dan Inggris juga ikut terlibat dalam memfasilitasi pembunuhan massal tahun 1965 di Indonesia.<sup>21</sup> Australia, Inggris dan Amerika Serikat terlibat menggunakan propaganda untuk memanipulasi opini internasional yang mendukung tentara Indonesia.

Kehadiran konsep *Transnational Advocacy Network* merupakan implikasi dari terhambatnya saluran aspirasi antara pemerintah dengan rakyatnya. Demikian pula yang terjadi antara koalisi masyarakat yang menuntut adanya penegakan HAM atas tragedi pembantaian massal pasca G30SPKI dengan pemerintah Indonesia. Menurut penulis hal ini menjadi penting untuk diteliti dikarenakan pemerintah Indonesia terhadap tragedi ini cenderung menutupi fakta yang terjadi. Sejumlah upaya dalam melakukan penegakan HAM korban G30SPKI berjalan sangat lambat dan tidak sedikit yang berakhir dengan tangan kosong. Hingga akhirnya mereka meminta pertolongan melalui *International People's Tribunal* (Pengadilan Rakyat Internasional) untuk mendapat keadilan atas hak asasi mereka.

---

<sup>21</sup> International People's Tribunal 1965, "Australia, UK, US all complicit in Indonesian 1965 massacres, international judges say", (Online) diakses pada 1 Desember 2017 <http://www.tribunal1965.org/en/australia-uk-us-all-complicit-in-indonesian-1965-massacres-international-judges-say/>

## 1.2 Rumusan permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah ; **“Bagaimana proses advokasi internasional jejaring advokasi transnasional korban pelanggaran HAM tragedi G30SPKI oleh IPT65 di tahun 2015-2016?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yakni mendeskripsikan perjuangan koalisi masyarakat korban pelanggaran HAM tragedi G30SPKI dalam meraih penegakan HAM di dunia Internasional. Instrumen yang digunakan oleh koalisi masyarakat ini adalah dengan menggunakan jejaring advokasi HAM internasional. Korban pelanggaran HAM pasca tragedi G30SPKI telah mencapai ratusan ribu orang dan hal ini tidak disampaikan secara terbuka oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan jejaring dan solidaritas yang dibangun oleh koalisi masyarakat korban pelanggaran HAM tragedi G30SPKI, guna menekan pemerintah Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia yang seharusnya mereka peroleh.

Adapun strategi-strategi korban pelanggaran HAM 1965 untuk merubah kebijakan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan *information politics* untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan cepat terkait isu yang diteliti
2. *Symbolic Politics* digunakan untuk menarik perhatian masyarakat untuk peduli terhadap isu
3. *Leverage Politics* yang kemudian terbagi menjadi *moral leverage* dan *moral leverage* mempengaruhi aktor atau negara yang dituju agar mengubah kebijakan atau posisi mereka dalam suatu isu.



4. Dan yang terakhir adalah *Accountability Network* yaitu menjadi tolok ukur bagi para aktor dengan parameter aktor lain akan patuh atau tidak untuk melakukan kebijakan yang telah didukung oleh aktor yang lebih kuat

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini dilihat dari segi praktis maupun akademis adalah sebagai berikut:

##### **1. Segi Akademis**

1. Sebagai bahan kajian dalam membangun pemikiran dan pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang identitas negara dan masyarakat, serta politik domestik maupun internasional.
2. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.
3. Mendapat pengetahuan yang lebih lengkap dan terstruktur mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti

##### **2. Segi Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumbangan pemikiran atau memberikan perspektif lain dalam melihat identitas suatu negara dan masyarakat, terutama terkait dengan isu hak asasi manusia di Indonesia.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### 2.1 Studi Terdahulu

Studi terdahulu dalam penelitian ini menggunakan tulisan dari Puti Parameswari, M.Si yaitu “*Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion di Tiongkok*”. Tulisan ini membahas tentang upaya advokasi *Greenpeace* sebagai NGO Internasional, terhadap suatu isu lingkungan pencemaran air di Tiongkok yang diakibatkan oleh industri tekstil.

Dalam tulisannya, Puti menjabarkan bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh aktor transnasional dalam memberikan tekanan terhadap Negara. Puti Parameswari juga beranggapan bahwa tekanan Internasional menjadi salah satu faktor pendukung bagi upaya advokasi yang dilakukan oleh aktor transnasional dalam mengadvokasi sebuah isu transnasional.

*Greenpeace*, yang termasuk dalam salah satu NGO lingkungan global independen, memiliki fokus kegiatan advokasi isu lingkungan melalui strategi advokasi kampanye.<sup>22</sup> Melalui aksinya, NGO ini bertujuan merubah perilaku manusia untuk melindungi dan melestarikan lingkungan serta memelihara perdamaian. Dalam menjalankan aksinya, *Greenpeace* yang memiliki kedudukan yang kuat secara politis ini, banyak melakukan advokasi dalam bentuk kampanye serta strategi yang melibatkan media. Meskipun dapat mengadvokasi ide secara politik, namun *Greenpeace* tetap berada secara netral dan independen.

---

<sup>22</sup> Parameswari Puti, *Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion di Tiongkok*, (2016)

Dengan fokus kegiatan tersebut, *Greenpeace* terpicu untuk melakukan upaya advokasi terkait persoalan polusi air di Tiongkok, yaitu *Detox Campaign on Fashion*.<sup>23</sup> Aksi kampanye ini memiliki agenda utama pembersihan atau penghilangan bahan-bahan kimia berbahaya dari produksi industri tekstil di Tiongkok. Industri tekstil menjadi industri terbanyak penyumbang limbah pabrik bahan kimia berbahaya bagi sumber air di Tiongkok.

*Greenpeace* memulai *Detox Campaign* sejak bulan Juli tahun 2011 lalu, yang sebelumnya telah melakukan penelitian selama kurang lebih satu tahun terhadap persoalan polusi air di Tiongkok. Dan kemudian *Greenpeace* mengeluarkan laporan penelitian "*Dirty Laundry*" yang menyebutkan bahwa para pelaku bisnis turut bertanggung jawab atas polusi air di Tiongkok<sup>24</sup>. Fakta ini kemudian yang mendorong *Greenpeace* menarik solusi atas permasalahan ini adalah dukungan, partisipasi dan tanggung jawab dari *brand-brand fashion* ternama dunia yang terhubung langsung dengan industri tekstil di Tiongkok.

Dalam kasus ini Puti menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* dengan *Greenpeace* sebagai aktor transnasional yang melakukan strategi advokasi ke berbagai arah melalui kampanye "*Detox Campaign on Fashion*".<sup>25</sup> Dengan menggunakan 4 strategi TAN, *Greenpeace* memberikan berbagai bantuan penyediaan akses dan informasi yang kemudian termasuk dalam strategi *Information Politics*. Selanjutnya *Greenpeace* melakukan strategi *symbolic politics* melalui upaya atau tindakan identifikasi dan memberikan keyakinan terhadap pelaku bisnis transnasional untuk menjadi pemicu memperkuat jejaring terkait isu yang dikemukakan. Kemudian dalam strategi *leverage politics*,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

*Greenpeace* menggalang dukungan dari berbagai pihak seperti MNC, masyarakat global, organisasi internasional dimana hal ini termasuk dalam pendekatan *moral leverage* yakni di mana para aktor membentuk *mobilisation of shame*. Tujuan dari dibentuknya *mobilisation of shame* yaitu mengubah perilaku negara atau aktor lain. Dan dengan adanya dukungan internasional, untuk strategi *accountability politics* *Greenpeace* berhasil memberikan tekanan kepada Tiongkok sebagai aktor Negara untuk melakukan advokasi terhadap isu polusi air.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian milik Puti Parameswari, M.Si adalah menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* dimana dalam tulisannya, Puti menggunakan 4 strategi yaitu *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics* dan *Accountability Politics* dengan hasil *Greenpeace* berhasil memberi tekanan kepada Tiongkok untuk melakukan advokasi terhadap isu polusi air. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tulisannya Puti menggunakan *Greenpeace* sebagai aktor sedangkan penulis menggunakan kaum intelektual dan *local social movements*.

Studi terdahulu selanjutnya merupakan artikel jurnal oleh Julia Retta yang berjudul *Consequences of the Arab Spring for Women's Political Participation*.<sup>26</sup> Hal yang dipelajari oleh penulis dari tulisan tersebut adalah isu HAM yang diangkat, kemudian bersinggungan dengan isu HAM yang akan diteliti oleh penulis. Dimana dalam tulisan Retta ingin meneliti tentang partisipasi politik perempuan di negara-negara Timur Tengah di tengah *Arab Spring* yang terjadi pada saat itu. Penelitian lebih di kerucutkan di dua negara, yakni Mesir dan

---

<sup>26</sup> Julia Retta, *Consequences of the Arab Spring for Women's Political Participation*, Journal of Women and Human Rights in the Middle East: A Change Seasons For Arab Women? Issue 1, (Fall 2013), Rice University's Baker Institute.

Tunisia. Hal ini dilakukan karena di regional ini berada di urutan terendah dalam skala kesetaraan gender secara keseluruhan, terlebih dalam hal pemberdayaan politik dan kesempatan dalam berpartisipasi di bidang ekonomi.<sup>27</sup>

Bagaimana kemudian Retta cara yang dilakukan oleh masyarakat perempuan di Tunisia dan Mesir untuk meningkatkan kesetaraan gender di sana, terbagi menjadi dua cara. Pertama, melalui protes/aksi demo pada masa *Arab Spring* oleh para aktivis perempuan di Mesir dan Tunisia. Tercatat pada demo revolusi di Mesir 30% pendemo merupakan aktivis perempuan, hal ini merupakan angka yang signifikan ditinjau dari minoritasnya masyarakat perempuan di negara-negara Timur Tengah tersebut.<sup>28</sup> Para aktivis perempuan bersama dengan para aktivis pria melakukan demo ke jalan raya dan juga aktif di dunia maya untuk melakukan protes terhadap pemerintahan dilakukan pada saat *Arab Spring* berlangsung.<sup>29</sup>

Kedua adalah peran penting dari sosial media dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat perempuan di Timur Tengah. Dimana, *facebook* menjadi sarana komunikasi untuk menghimbau dan menyatukan masyarakat dalam melakukan protes dan demo pada masa *Arab Spring*. Selain itu sebagian besar liputan media akan *Arab Spring* juga didapat dari penggunaan media sosial para aktivis yang berusaha untuk menggerakkan perlawanan terhadap rezim.<sup>30</sup> Dalam penelitian Retta juga menyimpulkan bahwa media sosial berfungsi sebagai penyeimbang gender dalam partisipasi politik perempuan di tengah *Arab Spring*, mengingat pria dan perempuan Arab menunjukkan pola yang sama dalam

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*



penggunaan media sosial serta pendapat mereka mengenai keterlibatan perempuan dalam partisipasi masyarakat.<sup>31</sup>

Sedangkan terdapat dua hambatan akan sulitnya kesetaraan gender bisa benar-benar berjalan di Timur Tengah, yang pertama merupakan keuntungan politik yang tidak merata bagi kaum perempuan baik sebelum maupun setelah *Arab Spring* dan juga sulitnya perubahan budaya.<sup>32</sup> Faktor kedua adalah karena kebiasaan/adat budaya, sosial, dan ekonomi posisi dan peran kaum perempuan di Timur Tengah. Sehingga masih adanya sikap konservatif terhadap perempuan merupakan hambatan utama pemberdayaan politik perempuan di negara-negara Arab.<sup>33</sup>

Dalam tulisan Julia Retta memiliki persamaan dengan penulis yaitu membahas perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia, jika Retta berfokus pada HAM wanita di Timur Tengah, penulis berfokus pada korban pelanggaran HAM 1965. Kemudian perbedaan dalam tulisan Julia Retta dengan penulis adalah negara yang diteliti, yaitu antara Timur Tengah dan Indonesia.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

## 2.2 Konsep Transnational Advocacy Network

*Transnational Advocacy Network* atau jejaring advokasi transnasional merupakan sebuah konsep yang dikemukakan oleh Margaret Keck dan Kathryn Sikkink, yang telah muncul dalam politik internasional dan tidak terlepas dari perkembangan interaksi antar aktor internasional. Dalam hal ini yakni bagaimana para aktor internasional yang berasal dari disiplin ilmu baik dari negara maupun non-negara berbeda berinteraksi satu sama lain. Para aktor tersebut memiliki kesamaan baik dalam ide maupun nilai-nilai prinsip yang dianut. Implikasi dari pola interaksi tersebut membangun sebuah upaya ataupun pergerakan untuk memengaruhi suatu kebijakan, wacana, ataupun peraturan yang diproduksi oleh suatu negara ataupun institusi lainnya.<sup>34</sup> Dengan demikian, maka, Keck dan Sikkink mendefinisikan jejaring advokasi internasional sebagai sebuah struktur yang komunikatif.

Para aktor yang terlibat dalam jejaring advokasi internasional tersebut memiliki motivasi secara terorganisir untuk mempromosikan ide atau prinsip bersama. Oleh karena itu, jejaring advokasi transnasional yang terbentuk memiliki sifat komunikasi sukarela, saling timbal balik, dan sejajar satu sama lain.<sup>35</sup> Dalam pembentukan jejaring advokasi transnasional, setidaknya terdapat tujuh jenis aktor yang umum. Ketujuh aktor pembentuk jejaring advokasi transnasional tersebut, antara lain:<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Margaret Keck dan Kathryn Sikkink, *Transnational advocacy networks in international and regional politics*, (Oxford : Blackwell Publishers, 1999), halaman 89

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 92

- (a) Lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional serta kelompok organisasi peneliti dan advokasi
- (b) Kelompok pergerakan sosial di tingkat lokal
- (c) Lembaga amal
- (d) Media
- (e) Kelompok gereja, serikat buruh, lembaga konsumen, dan kelompok intelektual
- (f) Organisasi inter-pemerintah
- (g) Kelompok atau anggota yang mewakili parlemen ataupun pemerintah.

Jejaring advokasi transnasional muncul sebagai ruang politik yang berusaha menjembatani sebuah dialog ataupun kepentingan dari sebuah kelompok terhadap pemerintah atau institusi lainnya baik secara formal ataupun informal.<sup>37</sup> Sehingga dalam prosesnya, jejaring advokasi transnasional menggunakan pendekatan sosial, budaya, dan politik sebagai instrumen utama dalam kegiatannya. Setidaknya, terdapat tiga alasan yang menjadi latar belakang dari proses terbentuknya jejaring advokasi transnasional. Pertama, terputusnya saluran antara kelompok-kelompok domestik terhadap pemerintah mereka. Terputusnya saluran tersebut diakibatkan proses konflik yang terus berlarut-laut tanpa ada penanganan efektif. Karakteristik dalam pembentukan jejaring advokasi internasional dalam permasalahan ini yakni melalui pola *boomerang pattern*.<sup>38</sup> Kedua, aktivis atau politisi yang menggunakan jejaring advokasi internasional sebagai langkah promosi politik mereka. Ketiga, konferensi internasional atau sejenisnya sebagai instrumen guna memperkuat jaringan yang dimilikinya.

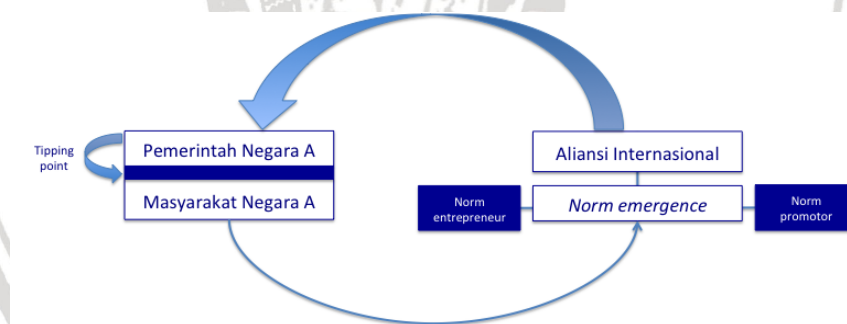
---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 90

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 93

Guna membahas bagaimana akibat dari terputusnya saluran politik antara pemerintah dengan kelompok sipil yakni dengan membahas *boomerang pattern*. *Boomerang pattern* merupakan usaha atau cara yang digunakan oleh para aktor jejaring advokasi transnasional untuk mendapatkan dukungan dari kelompok ataupun institusi lain di tingkat internasional. Secara tradisional, *boomerang pattern* yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink mengacu pada mobilisasi politik perlawanan terhadap negara. Namun demikian, model *boomerang pattern* tersebut dapat dipakai untuk membahas sebuah konflik politik dari suatu kelompok yang memiliki konflik politik terhadap pemerintahnya. Dalam hal ini, resolusi suatu konflik dapat dihadirkan tanpa melalui prosedur bantuan negara atau hukum yang menaunginya.<sup>39</sup>

**Gambar 2. 1 Alur *Boomerang Pattern***



**Sumber: Keck dan Sikkink (1999:13)**

Strategi dalam jejaring advokasi transnasional yakni berusaha memperoleh dukungan sebanyak mungkin dari kelompok politik maupun gerakan sosial lain. Oleh karena itu, kekuatan informasi, ide, maupun strategi yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan di suatu negara. Anggota

<sup>39</sup> David P. Baron, *Private Politics*, Journal of Economics & Management Strategy Volume 12, (Issue 1, 2003), halaman 31

jejaring akan berusaha membawa masalah menjadi agenda maupun diskursus publik melalui sejumlah instrumen yang diproduksi oleh *framing*. Maka, hal yang paling terpenting dalam strategi jejaring advokasi transnasional yakni membingkai sejumlah masalah dengan cara-cara baru sehingga aktor jejaring advokasi transnasional membantu atau mengubah pemahaman aktor-aktor lain terhadap identifikasi identitas serta kepentingan mereka.<sup>40</sup>

Adapun strategi yang diterapkan dalam jejaring advokasi transnasional dengan tujuan berhasil menekan atau mengubah posisi aktor lain untuk suatu kebijakan yakni antara lain; *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.<sup>41</sup>

Strategi jejaring advokasi transnasional yang pertama ialah *information politics*. *Information politics* merupakan strategi untuk menggerakkan informasi politik yang berguna secara cepat dan tepat terhadap suatu area yang paling berdampak pada informasi politik tersebut. Para aktor jejaring advokasi transnasional memberikan informasi yang tidak dapat bebas di luar, sumber-sumber informasi yang jarang dan berguna bagi aktivis lainnya<sup>42</sup> sehingga setiap aktor dapat bertukar informasi untuk memperkuat jejaring dan gerakan tekanan terhadap pemerintah. Strategi kedua yakni *symbolic politics* yang merupakan strategi di mana aktivis mem-*framing* atau melakukan suatu tindakan yang masuk akal akan suatu situasi. *Framing* isu tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi dan memberikan keyakinan dalam berbagai aktivitas simbolik sehingga dengan

---

<sup>40</sup> Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, *Op. Cit.*, halaman 95

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*



strategi *symbolic politics* menjadi pemicu untuk memperkuat jejaring dengan meyakinkan kesadaran akan isu yang dikemukakan.

Strategi ketiga ialah *leverage politics* yakni merupakan strategi yang dilakukan oleh aktor untuk menekan aktor negara melalui instrumen dukungan dari aktor yang lebih kuat. Dalam strategi *leverage politics*, terdapat dua pendekatan yakni *material leverage* dan *moral leverage*. *Material leverage* merupakan pendekatan *leverage politics* yang terkait dengan bantuan atau donasi yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, para aktivis tersebut akan berjuang untuk mengusahakan para aktor negara membatasi atau memotong anggaran yang dianggap berkontribusi terhadap sumber masalah. Dengan demikian, dana tersebut justru dapat digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang mengemuka tersebut.<sup>43</sup> Sedangkan *moral leverage* dalam strategi *leverage politics* yakni di mana para aktivis membentuk *mobilisation of shame*. Tujuan dari dibentuknya *mobilisation of shame* yakni bertujuan untuk mengubah perilaku negara atau aktor lain. Sehingga para aktor tersebut kemudian akan mengubah perilaku mereka untuk dapat memperoleh *prestige* di pergaulan internasional.<sup>44</sup> Sedangkan strategi keempat yakni *accountability politics*, yakni merupakan strategi di mana para aktivis jejaring melakukan suatu usaha dengan tujuan aktor lain akan patuh untuk melakukan kebijakan yang telah didukung oleh aktor yang lebih kuat.<sup>45</sup>

Berdasarkan keempat strategi jejaring advokasi transnasional di atas, maka, terdapat tahapan yang menjadi tolak ukur atas keberhasilan upaya tersebut, yang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 97

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 97-98

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 98

bertujuan untuk menilai sejauh mana pengaruh jejaring terhadap pencapaian tujuan.<sup>46</sup> Pertama, isu yang diangkat oleh para aktor jejaring advokasi transnasional yakni isu yang diangkat menjadi perhatian atau bagian dalam agenda setting pemerintah. Tahap kedua yakni di mana para aktor mampu memengaruhi posisi diskursus pemerintah, organisasi regional, maupun internasional. Tahapan ketiga yakni para aktor jejaring berhasil memengaruhi pembuatan atau jalannya prosedur institusional. Tahap keempat yakni para aktivis mampu untuk memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan pada aktor yang dituju. Sedangkan tahap kelima, yakni para aktor mampu untuk mengubah perilaku negara yang dituju.

### 2.3 Operasionalisasi Konsep

| Konsep                          | Variabel                    | Indikator  | Operasionalisasi   |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Transnational Advocacy Networks | <i>Information Politics</i> | <p>1. Network Effectiveness, melalui penggunaan data-data penelitian baik secara domestik atau internasional</p> <p>2. Testimonies, korban</p> | <p>1. Melihat bagaimana network effectiveness IPT65 melalui penggunaan data-data penelitian oleh para ahli secara domestik maupun internasional.</p> <p>2. Melihat bagaimana testimoni</p> |

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 98

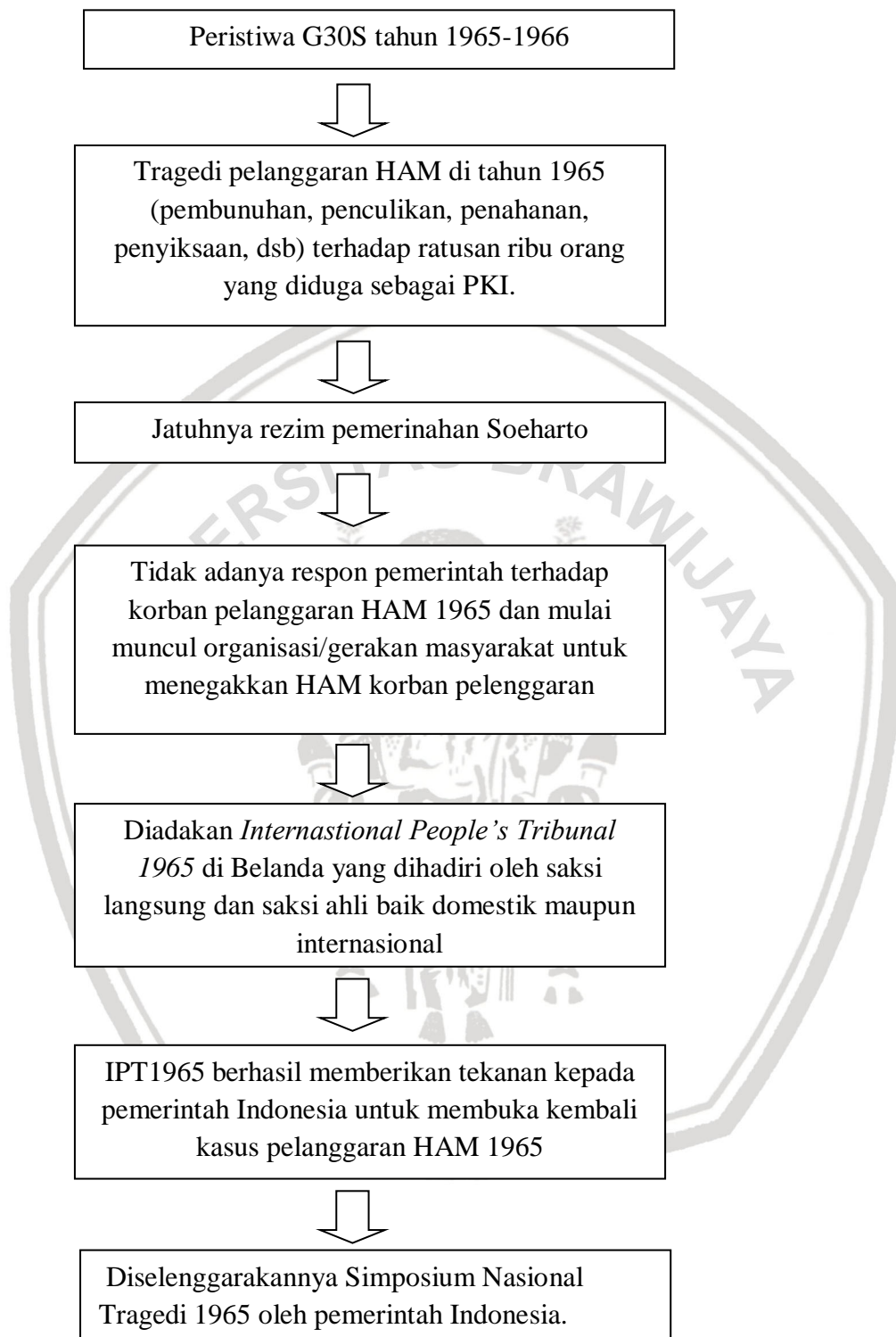
|  |                          |   |  |
|--|--------------------------|---|--|
|  |                          | <p>pelanggaran HAM terkait isu melalui dokumentasi</p> <p>3. Penggunaan Media online</p>    | <p>yang diberikan korban pelanggaran HAM 1965 melalui pemutaran video dan menghadirkan saksi langsung dan saksi ahli.</p> <p>3. Bagaimana penggunaan media online (website, facebook, twitter, youtube, flickr) maupun film dokumenter oleh IPT65.</p> |
|  | <i>Symbolic Politics</i> | <p>1. Kampanye yang berupa seminar</p> <p>2. Meluncurkan publikasi terkait isu HAM 1965</p> | <p>1. Kampanye yang dilakukan oleh IPT65 dalam kasus PKI di Jerman dan di Den Haag.</p> <p>2. Peluncuran buku “Pulang” oleh Leila Chudori</p>  |

|  |                                 |  |   |
|--|---------------------------------|--|---|
|  |                                 | <p>3. Mengadakan kegiatan sosial untuk mengenang isu pelanggaran HAM 1965</p> <p>4. Memanfaatkan media nasional sebagai media kampanye</p> | <p>3. Mengadakan kegiatan “50 years after 1965”</p> <p>4. Penggunaan media Indonesia</p>  |
|  | <p><i>Leverage Politics</i></p> | <p>1. Material Leverage</p> <p>2. Moral Leverage</p>   | <p>1. Tidak ditemukannya operasionalisasi <i>material leverage</i>.</p> <p>2. Mendapat perhatian dari <i>Amnesty International</i> dan TAPOL (London), Jimmy Carter dan Desmond Tutu, serta</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | pengajuan surat kepada senator Amerika Serikat, Tom Udall.  |
|  | <i>Accountability</i><br><i>Politics</i> | Network, mengadakan simposium nasional | Diadakannya Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 oleh pemerintah Indonesia dengan menghadirkan beberapa ahli dan saksi. |



## 2.4 Alur Pemikiran



## 2.5 Argumen Utama

Lambatnya respon pemerintah terhadap kasus penegakan HAM untuk korban tragedi G30SPKI, mengakibatkan munculnya gerakan dari koalisi masyarakat korban pelanggaran HAM tragedi G30SPKI yang menuntut penegakan HAM di Indonesia melalui *International People's Tribunal 1965* di Den Haag Belanda.

Dalam menganalisa isu tersebut, penulis kemudian menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* (Jejaring Advokasi Transnasional), yaitu tentang proses advokasi yang dilakukan secara internasional dan memiliki empat strategi *Transnational Advocacy Network* yaitu *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics*. Dengan menggunakan empat strategi tersebut penulis akan menilai apakah advokasi tersebut berhasil atau tidak dan bagaimana dampaknya terhadap pemerintah Indonesia.

Dikarenakan pemerintah Indonesia tidak menunjukkan respon apapun untuk melakukan penegakan hak asasi manusia terhadap para korban pembantaian tahun 1965, maka organisasi dan gerakan masyarakat penegak hak asasi manusia Indonesia memilih untuk melakukan aksi dengan membentuk jaringan advokasi di ranah internasional. Yaitu dengan cara membentuk sebuah kepanitiaan yang berbasis internasional dimana tidak hanya menghimpun kekuatan domestik namun juga secara internasional dengan melibatkan berbagai macam lapisan masyarakat, termasuk para aktivis dan peneliti dari luar.

Hal ini kemudian membentuk suatu pola, yaitu *boomerang pattern* dimana pemerintah Indonesia menutup akses komunikasi dengan aktivis penegak hak asasi manusia, yang kemudian akhirnya para aktivis tersebut mencari bantuan

secara internasional dan membentuk kepanitaan untuk menyelesaikan isu ini dan memberi tekanan kepada pemerintah Indonesia.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan menggambarkan dan memaparkan analisa proses advokasi internasional korban pelanggaran hak asasi manusia tragedi G30SPKI oleh *International People's Tribunal 1965* (IPT65) di tahun 2015-2016. Jenis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu merupakan data yang berasal dari sumber kedua. Dalam penelitian ini penulis mendapat data sekunder dari dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, dan e-book.

#### 3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Suatu penelitian perlu memiliki ruang lingkup obyek dan waktu penelitian yang jelas supaya sumber data penelitian yang digunakan tidak terlalu meluas dan lebih fokus dalam menganalisa penelitian. Dalam penelitian ini penelitian akan membatasi pada upaya-upaya koalisi masyarakat korban pelanggaran HAM tragedi G30SPKI dalam memperjuangkan hak asasi manusianya melalui proses advokasi internasional *Transnational Advocacy Network* dengan IPT65 sebagai aktornya. *Level of Analysis* yang digunakan adalah negara, yaitu Indonesia. Selain itu juga melihat desakan internasional dari keputusan persidangan IPT65 dalam mempengaruhi kebijakan Indonesia. Jangka waktu penelitian dengan melihat waktu dimulainya IPT65 yaitu tahun 2015.

#### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi pustaka yang dilakukan atas hasil studi terhadap beberapa bahan pustaka yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, situs resmi instansi hingga media massa elektronik. Data yang terkumpul kemudian

dianalisa dan akhirnya menemukan kesimpulan. Untuk itu data yang digunakan lebih bersifat sekunder terkait penggunaan studi pustaka.

### 3.4 Teknik Analisa Data

Dalam suatu penelitian, supaya data yang dihasilkan dapat dipahami dan dimengerti maka perlu menggunakan suatu metode analisis data. Analisis data ini digunakan untuk memberikan makna yang berguna dalam membuat suatu kesimpulan dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisis data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode analisis yang jelas dan sistematis untuk menarik kesimpulan-kesimpulan. Serta untuk membuktikan kebenaran konsep yang digunakan, penulis melakukan verifikasi penelitian yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran teori yang telah ada dan mengaplikasikannya pada kasus penelitian yang penulis bahas sehingga akhirnya akan didapat jawaban yang memperkuat hipotesa penulis.

### 3.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab. Pada **Bab I** terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah munculnya *Internastional People's Tribunal 1965* dan usaha koalisi masyarakat korban pelanggaran HAM tragedi G30SPKI sebagai upaya penegakan HAM melalui pembentukan jejaring advokasi transnasional. Rumusan masalah mengenai proses advokasi internasional TAN korban pelanggaran HAM 1965 oleh *International People's Tribunal 1965*.

Kemudian pada **Bab II**, yaitu kerangka penelitian. Dalam bab ini terdiri dari studi terdahulu mengenai penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan penelitian penulis. Studi terdahulu yang digunakan penulis adalah tulisan milik



Puti Parameswari, M.Si yaitu “*Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion di Tiongkok*” dan. milik Julia Retta “*Consequences of the Arab Spring for Women’s Political Participation*”.

Selanjutnya terdapat konseptualisasi, operasionalisasi konsep, kerangka pemikiran serta argumen utama sebagai jawaban sementara yang diperoleh penulis dari operasionalisasi konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konseptualisasi *Transnational Advocacy Networks* yang dikemukakan oleh Margaret Keck dan Kathryn Sikkink. Untuk operasionalisasi konsep menjelaskan tentang konsep, variabel dan indikator serta operasionalisasi dari indikator yang ada. Dan untuk argumen utama menjabarkan hipotesis dari hasil keputusan siding IPT65 yang menyatakan Indonesia bersalah dan kemudian memberikan *pressure* kepada pemerintah Indonesia untuk membuka kembali kasus penegakan HAM melalui Simposium Tragedi 1965 oleh Lemhanas.

Di **Bab III** berisi tentang metode yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Bab ini terdiri atas jenis penelitian yang dilakukan, ruang lingkup penelitian, penjelasan mengenai cara yang dilakukan dalam melakukan analisis, bentuk hasil analisis, dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang penulisan pada bab-bab penelitian.

Pada **Bab IV** berisi tentang uraian data yang diperlukan oleh penulis dalam melakukan analisis. Bab ini menjelaskan tentang aspek historis kasus, bagaimana kasus ini kemudian dipandang dalam masa orde lama dan orde baru, serta kemunculan koalisi masyarakat korban pelanggaran HAM tragedi G30SPKI yang membuka isu menuntut penegakan HAM melalui jejaring advokasi transnasional.

Dalam **Bab V** berisi tentang pembahasan mengenai fakta yang ditemukan di lapangan sesuai dengan kerangka pemikiran dan operasionalisasi konsep yang sudah dibuat sebelumnya.

Terakhir, **Bab VI** akan berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran yang direkomendasikan kepada pihak tertentu yang berkaitan dengan pembahasan penulis.



## BAB IV

### SEJARAH PELANGGARAN HAM TRAGEDI G30S-PKI 1965 DAN AWAL MULA TERBENTUKNYA IPT65

#### 4.1 Aspek Historis Kasus Pelanggaran HAM Tragedi 1965

Tanggal 30 September 1965 telah terjadi tragedi G30S-PKI, yang disusul dengan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia pada tanggal 1 Oktober 1965. Tindakan pembantaian terhadap anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) yang menjadi tersangka kasus penculikan dan pembunuhan 6 Jenderal Angkatan Darat yang jasadnya dimasukkan ke dalam Lubang Buaya (G30S-PKI) tahun 1965, dianggap sebagai kejahatan genosida pemeritahan pada masa itu.<sup>47</sup>

Tindak penangkapan besar-besaran yang didasarkan dugaan terhadap para anggota PKI dan juga organisasi-organisasi yang terkait dengan komunisme seperti Lekra, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia (BTI), gerakan Wanita Indonesai (Gerwani), dll menjadi masalah besar dalam kasus ini.<sup>48</sup>

Banyak sumber yang mengatakan bahwa jumlah korban sekitar 500 ribu orang. Akan tetapi menurut laporan Sarwo Edhie yang merupakan Panglima Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan salah satu orang yang berperan besar mengenai pemburuan orang-orang yang dituding terlibat dalam PKI mengatakan bahwa jumlah korban tewas hingga 3 juta

---

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> BBC Indonesia. 2017. Peristiwa G30S 1965, penumpasan PKI, dan hari-hari sesudahnya. Diambil dari <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41451322>

jiwa.<sup>49</sup> Namun jumlah tersebut merupakan jumlah minimal, karena diyakini bahwa 3 juta korban tersebut adalah anggota resmi PKI. Jumlah tersebut belum termasuk organisasi-organisasi yang diduga kuat sebagai komunis seperti Barisan tani Indonesia (BTI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), Pemuda Rakyat, dll. Terdapat kemungkinan total keseluruhan korban mencapai 26 juta jiwa.<sup>50</sup>

#### ***4.1.1. Gestapu/G30S-PKI (Gerakan 30 September) atau Gestok (Gerakan Satu Oktober) pada Tahun 1965 Menjadi Titik Balik Transisi Kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru***

Tragedi mengenaskan ini ditengarai dari insiden G30S-PKI, yakni rencana penculikan 7 Jenderal pada malam hari Kamis tanggal 30 September tahun 1965 oleh sekelompok pasukan dari kesatuan Angkatan Darat dengan dalih perintah dari Presiden Soekarno.<sup>51</sup> Akan tetapi mereka hanya berhasil menculik 6 dari 7 daftar orang tersebut, minus Jenderal Nasution. Adapun para 6 Jenderal tersebut adalah Letjen. Ahmad Yani, Mayjen. Suprpto, Mayjen. S. Parman, Mayjen. Haryono M.T., Brigjen. D.I Pandjaitan, Brigjen. Sutojo Siswomihardjo.<sup>52</sup> Akan tetapi Lettu. Piere Tendean yang merupakan ajudan dari Jenderal Nasution dan putri dari Jenderal Nasution

---

<sup>49</sup> Suriyanto, CNN Indonesia. 2015. YPKP 65 Klaim 3 Juta Lebih Korban Tewas lantaran Dituduh PKI. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150930054754-20-81729/ypkp-65-klaim-3-juta-lebih-korban-tewas-lantaran-dituduh-pki/>

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Op. Cit. Wirantaprawira, Cynthia

<sup>52</sup> Ibid

dibunuh di tempat. Pada saat itu Jenderal Nasution berhasil meloloskan diri dari penculikan tersebut dengan melompat ke rumah Duta Besar Irak yang terletak di sebelah kediaman beliau.<sup>53</sup>

Kemudian pada pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, sebuah susunan Dewan Revolusi diumumkan melalui Radio Rakyat Indonesia (RRI) bahwa terdapat sebuah gerakan yang terdiri dari pasukan Angkatan Darat yang telah menyelamatkan Presiden Soekarno dari *coup d'etat* yang akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal pada tanggal 5 Oktober 1965.<sup>54</sup>

Awal mula kebencian dan permusuhan terhadap PKI tersebut berasal dari percobaan kudeta ini. Kudeta ini sebenarnya merupakan kejadian yang amatlah ambigu dan tidak jelas dan sulit untuk dipahami sepenuhnya.<sup>55</sup> Hal ini dikarenakan sekelompok tentara yang merupakan pasukan penjaga Presiden Soekarno yang dipimpin oleh Letnan-Kolonel Untung menculik 6 Jenderal Senior Anti-Komunis dari kediamannya di pagi buta pukul 2 dari kediamannya pada tanggal 1 Oktober 1965. Tindakan ini seolah-olah merupakan usaha untuk menggagalkan kudeta sayap kanan yang dikabarkan akan dilakukan oleh para Jenderal tersebut.<sup>56</sup>

Terdapat kemungkinan bahwa para Jenderal tersebut diculik, diintimidasi, dan dipermalukan untuk meninggalkan rencana kudeta yang telah mereka duga. Dimana sebuah kelompok rahasia

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Cribb, Robert. 2009. The Indonesian Massacres. From Century of Genocide, 3<sup>rd</sup> Edition. Taylor and Francis, Inc.

<sup>56</sup> Ibid



PKI dimungkinkan terlibat dalam insiden penculikan tersebut, meskipun banyak anggota PKI tidak tahu menahu mengenai hal tersebut kecuali hanya segelintir pemuka PKI yang mengetahui tentang plot tersebut.<sup>57</sup> Bagaimanapun para penculik yang telah membunuh para Jenderal tersebut mengumumkan dari Pangkalan Udara Halim bahwa sebuah Dewan Revolusi baru telah merebut kekuasaan. Kemungkinan pengumuman tersebut dilakukan atas respon panik terhadap penculikan yang gagal. Akan tetapi hal tersebut dianggap dan dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia, termasuk oleh anggota PKI sendiri, bahwa hal tersebut merupakan usaha PKI untuk merebut kekuasaan.<sup>58</sup>

Empat hari kemudian jenazah dari keenam jenderal tersebut ditemukan di sebuah sumur yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan 'Lubang Buaya'. Di sela-sela kegiatan penggalian para korban ini, Jenderal Soeharto pada saat itu memberikan pernyataan bahwa pembunuhan para jenderal ini dilakukan oleh para aktivis PKI yang didukung oleh Angkatan Udara. Sehari setelah penemuan para jenazah, para awak media cetak yang berafiliasi dengan Angkatan Darat mengekspos foto-foto dari jenazah tersebut.<sup>59</sup> Mereka mengabarkan bahwa para Jenderal tersebut mengalami siksaan yang tidak berperikemanusiaan sebelum diakhiri hidupnya. Pemakaman para korban dilakukan secara besar-besaran pada tanggal 5 Oktober 1965, Jenderal Nasution memberikan pidato secara emosional karena

---

<sup>57</sup> Ibid

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Op. Cit. Wirantaprawira, Cyntha

beliau sendiri kehilangan seorang putrinya Ade Irma Nasution pada hari penculikan tersebut. Upacara pemakaman tersebut berlangsung tanpa kehadiran dari Presiden Soekarno, ketidakhadiran beliau tersebut yang kemudian menimbulkan beragam penafsiran dari masyarakat.<sup>60</sup>

Penyebaran foto-foto jenazah para korban yang dimuat di media cetak serta berita penyiksaan tersebutlah yang mendorong lahirnya histeria massa anti PKI dalam masyarakat Indonesia. Di banyak tempat para masyarakat tak henti-hentinya membicarakan penyiksaan yang dilakukan oleh Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Diisukan bahwa para anggota Gerwani telah mencukil mata Jenderal dan bahkan memotong kemaluannya.<sup>61</sup> Segera setelah berita tersebut dilansir dalam beberapa hari oleh media cetak tersebut, dimulailah pengganyangan besar-besaran terhadap PKI. Di Jakarta, kantor pusat PKI yang beum selesai dibangunpun mulai diluluhlantahkan. Beberapa orang pemimpin PKI pun ditangkap, tidak hanya itu para anggota PKI lain pun menjadi sasaran.<sup>62</sup>

Memang secara *de facto*, sejak tanggal 1 Oktober 1965 tersebut Jenderal Soeharto lah yang memegang kekuasaan dan Presiden Soekarno sendiri secara bertahap telah digeser dari ranah politik Indonesia. Strategi dan taktik Jenderal Soeharto dalam insiden Gestapu 1965 tersebut sangatlah efektif dan mematikan.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Ibid

<sup>63</sup> Ibid

Sehari setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno pada tahun 1966, Jenderal Soeharto secara resmi mengeluarkan surat perintah bernomor 1/3/1966 yang memuat tentang pembubaran serta pelarangan PKI dan organisasi-organisasi sejenis dan atau simpatisan PKI berdiri di Indonesia. “Ganjang Komunis!” hal ini menjadi pemicu akan pembunuhan massal serta penangkapan para anggota dan simpatisan PKI di banyak daerah di Indonesia.<sup>64</sup> Seketika inilah terlihat bahwa penghancuran PKI itu sesungguhnya adalah sasaran antara, karena target utama adalah untuk menggulingkan kepemimpinan Presiden Soekarno itu sendiri (Orde Lama) kala itu.<sup>65</sup>

Di beberapa daerah, kampanye penganyangan PKI diwujudkan dengan tindakan penculikan dan pembunuhan secara massal terhadap anggota dan juga simpatisan PKI. Bahkan semua anggota organisasi masyarakat yang diduga memiliki hubungan dengan PKI pun tak luput dan mengalami hal serupa.<sup>66</sup>

Pembantaian terkadang dilakukan oleh para tentara, terkadang oleh masyarakat sipil sendiri, dan terkadang oleh masyarakat organisasi Islam. Dalam hal ini, para tentara merupakan pengendali utama. Karena masyarakat sendiri menjadi korban dari unsur propaganda yang dibuat oleh Angkatan Darat yang secara nyata memiliki konflik dengan PKI.<sup>67</sup> Di beberapa daerah memang

---

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Ibid

<sup>66</sup> Ibid

<sup>67</sup> Ibid

terjadi konflik antara PKI dan kelompok lain dalam kalangan masyarakat. Di Klaten contohnya, aksi pembantaian massal terhadap anggota PKI tersebut menjadi ajang balas dendam karena masalah penyerobotan lahan-lahan antara musuh-musuh PKI dengan PKI sendiri yang sebelumnya sering terjadi. Hal-hal inilah yang menjadi benih-benih konflik dalam masyarakat Klaten, sehingga pasca Gestapu 1965 para anggota PKI menjadi sasaran utama kebencian yang telah terpendam sekian lama.<sup>68</sup>

Apa yang terjadi di Klaten tidak jauh berbeda dari daerah-daerah lainnya seperti Jombang dan Kediri. Dimana di dua daerah ini permusuhan antara PKI dan Barisan tani Indonesia (BTI) dengan masyarakat Islam ditengarai dengan saling tuduh menuduh dan saling menghina satu sama lain.<sup>69</sup> Seperti tuduhan kaum komunis yang menuduh umat Islam telah mengobarkan 'Jihad' untuk membunuh orang komunis dan mempertahankan tanah miliknya atas nama Allah, sedangkan umat Muslim menuduh PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI) melakukan penghinaan terhadap agama Islam. Hal-hal seperti inilah yang menjadi manifestasi konflik kepentingan antara dua kelompok tersebut.<sup>70</sup>

Bagi golongan PKI, tanah merupakan komoditi politik-ekonomi yang dapat dijadikan alasan untuk menyerang kaum Muslim yang merupakan penguasa tanah mayoritas. Sedangkan kaum Muslim sendiri menggunakan isu ideologi atheis golongan

---

<sup>68</sup> Ibid

<sup>69</sup> Ibid

<sup>70</sup> Ibid

PKI untuk menyerang balik. Dua hal ini berinti pada kepentingan ekonomi, akan tetapi dari keyakinannya masing-masing kedua kelompok ini berhasil membangun sebuah opini yang mengarahkan pengikutnya terhadap konflik yang berkepanjangan.<sup>71</sup>

#### 4.1.2 Perjuangan Para Korban G30S-PKI 1965 dari Tahun 1965 Hingga Saat Ini

Banyak cerita mengenai tindakan semena-mena seperti penangkapan tiba-tiba terhadap orang-orang yang hanya dianggap atau dikira terlibat dengan PKI. Seperti salah satu contohnya adalah cerita dari salah satu aktivis dan merupakan ketua dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bedjo Untung bercerita bahwa beliau merupakan korban keganasan militer dan masyarakat pada masa itu. Bedjo yang pada saat itu merupakan siswa SPG (Sekolah Pendidikan Guru), anggota dari Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia telah dituding militer sebagai organisasi yang berpayung PKI.<sup>72</sup>

Beliau ditangkap, ditahan, diinterogasi, disiksa, ditelanjangi dan dikirim ke penjara Tangerang –sebuah kamp kerja paksa- sekitar 26 kilometer ke arah barat dari Jakarta. Selama dalam tahanan beliau tinggal dalam kondisi tempat yang amat buruk, tidak cukup makanan dan dengan sanitasi yang sangat buruk.<sup>73</sup> Beliauupun menderita kekurangan gizi, banyak tahanan politik (tapol) yang dipenjarakan

<sup>71</sup> Ibid

<sup>72</sup> Untung, Bedjo. 2016. Abstraksi dari Konferensi *International Rekonsiliasi Sejarah Indonesia Dengan 1965: Fakta, Rumor & Stigma; 10-12 November 2016. Universitas Goethe Frankfurt, Jerman*. Diambil dari <http://ypkp1965.org/blog/2016/11/27/rekonstruksi-sejarah-indonesia-1965-dan-pelanggaran-negara/>

<sup>73</sup> Ibid



di penjara Tangerang tersebut yakni sekitar 2.000 tahanan. Sebagian besar dari tapol tersebut meninggal karena kelaparan kurang makan dan tidak adanya obat-obatan.<sup>74</sup> Bedjo juga mengungkapkan bahwa beliau harus mencari makanan tambahan, seperti tikus, ular, serangga, siput dan mencari dedaunan hanya untuk bertahan hidup. Bahkan beliau ditahan dalam kurun waktu 9 tahun (1970-1979) dan tanpa adanya proses peradilan.<sup>75</sup>

Cerita berikutnya penulis mengambil dari Ibarruri Sudharsono Aidit yang merupakan putra dari tokoh PKI DN Aidit. Pada tahun tersebut beliau berumur 16 tahun dan sedang berkuliah di Moscow. Tapi bagi rezim Orde Baru Ibarruri dianggap sebagai sosok yang berbahaya karena terdapat kemungkinan bahwa beliau juga termasuk dalam golongan PKI.<sup>76</sup>

Pada kala itu, paspornya langsung dicabut dan ia kehilangan kontak dengan keluarganya di Indonesia serta tidak bisa pulang lagi ke kampung halamannya. Bahkan tidak hanya itu, paranoia dari masyarakat Indonesia pun terasa bagi Ibarruri. Beliau bercerita tentang paranoia warga Indonesia yang mengalami indoktrinasi selama puluhan tahun.<sup>77</sup> Ketika sedang kuliah di luar negeri, beliau mempunyai teman yang cukup dekat dengannya di kampus. Suatu kali, Ibarruri menunjukkan kartu identitasnya yang memuat nama Aidit. Seketika temannya tersebut terdiam dan tidak pernah

---

<sup>74</sup> Ibid

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Diambil dari <http://www.dw.com/id/waktu-tau-saya-anak-aidit-teman-saya-lari/a-18139880>

<sup>77</sup> Ibid

menampakkannya lagi kepada Ibarruri. Karena bagi sebagian besar orang Indonesia, nama itu adalah sesuatu yang menakutkan, dan bisa membahayakan karir mereka.<sup>78</sup>

Efek yang ditimbulkan dari adanya pembunuhan massal pada tahun 1965, sekitar 750.000 orang ditangkap dengan tuduhan sebagai anggota PKI dengan sebagian besar tahanan di hukum mati dan sekitar 800 orang diadili, sebagian tahanan tetap berada dipenjara hingga bertahun-tahun tanpa keadilan dan tanpa diberikan akses untuk membela diri secara legal.<sup>79</sup> Meskipun adanya pembebasan secara massal pada tahun 1970, para tahanan tidak sepenuhnya “bebas”, para tahanan bebas masih menerima hukuman secara lanjutan dimana dokumen resmi identitas mereka ditandai dengan stempel ET yang merupakan singkatan dari *Ex-Tapol* yang berarti mantan tahanan politik. Para mantan tahanan ini kemudian diharuskan untuk lapor secara rutin ke kepolisian atau militer sehingga mereka tidak mempunyai kebebasan dalam bergerak, berasosiasi, berekspresi atau bekerja, para mantan tahanan ini menjadi objek dikenakan hukuman secara sewenang-wenang, penangkapan ulang dan pemerasan.<sup>80</sup>

Pada tahun 1980an hingga 1990an diadakan peraturan baru yaitu peraturan penyaringan yang digunakan untuk memburu orang-

---

<sup>78</sup> Ibid

<sup>79</sup> Pellegrini, Chloe. 2012. *Indonesia's Unresolved Mass Murders : Undermining Democracy*. Promoting Human Rights, Peace and Democracy in Indonesia. Tapol diakses [website] [http://tapol.org/sites/all/modules/custom/tpl\\_sorry/docs/Indonesias\\_unresolved\\_mass\\_murder\\_s.pdf](http://tapol.org/sites/all/modules/custom/tpl_sorry/docs/Indonesias_unresolved_mass_murder_s.pdf) pada 14 Desember 2017 halaman 7

<sup>80</sup> Ibid, halaman 7

orang yang masih memiliki hubungan baik hubungan pernikahan ataupun hubungan darah dengan *Ex-Tapol* atau anggota PKI yang telah meninggal.<sup>81</sup> Peraturan ini kemudian diresmikan pada tahun 1990 dengan membentuk Tim Investigasi Khusus dengan menyebarkan nilai, sikap dan pendapat kepada masyarakat dengan mengklasifikasikan orang-orang yang dicurigai komunis dalam kategori “*Ex-Tapol*”, “orang-orang kotor” dan “pengotor lingkungan” sesuai dengan sejauh mana mereka terlibat dalam PKI.<sup>82</sup>

Akibat dari peraturan ini banyak keluarga yang hancur hanya karena kecurigaan diduga merupakan anggota PKI, banyak yang diberhentikan dari pekerjaannya secara semena-mena dan hak sipil mereka juga dicabut. Parlemen, tentara, pemerintahan dan universitas dibersihkan dari staf dan karyawan yang diduga “kotor” dengan melakukan pemecatan, hal ini menyebabkan adanya perpecahan pernikahan dan menciptakan ketakutan yang meluas di masyarakat.

Sekitar tahun 1984-1998, adanya pemutaran film buatan negara yang diputar di sekolah-sekolah berjudul “Pengkhianatan G30s/PKI” telah banyak mempengaruhi masyarakat secara luas untuk percaya dimana PKI merupakan dalang dibalik pembantaian jendral-jendral dan melawan perdamaian komunitas antar muslim. Organisasi perempuan Gerwani dituduh berhubungan dengan PKI dengan tuduhan sebagai pemutilasi alat kelamin dari jendral-jendral

---

<sup>81</sup> ibid

<sup>82</sup> ibid

yang tewas. PKI dituduh sebagai “setengah manusia” dan dituduh mempunyai kekuatan jahat supernatural. Mitos ini diperkuat dengan peringatan resmi dan lokasi untuk mengenang kejadian pembantaian di monumen Suci Pancasila dan Museum Pengkhianatan PKI yang diresmikan pada tahun 1992.<sup>83</sup>

Label komunisme digunakan untuk menutup pergerakan perlawanan yang menentang pemerintah karena adanya rumor pada tahun 1988 dimana komunis kembali bangkit berkonspirasi melawan pemerintah dan beberapa grup politik.<sup>84</sup> Adanya demonstrasi pekerja ataupun perlawanan dari partai politik oposisi akan diberi label sebagai ancaman komunisme dan angkatan bersenjata diturunkan untuk melakukan penindasan kekerasan terhadap “musuh imajiner” ini. Seperti pada tahun 1992 di Yogyakarta, dimana adanya demonstrasi damai yang dilakukan oleh mahasiswa mengenai isu pembunuhan massal Santa Cruz di Dili (Timor Timur) dihentikan paksa, mahasiswa yang ditangkap dipaksa untuk mengakui bahwa kegiatan yang mereka lakukan ini dibawah pengaruh Komunisme yang ingin memperoleh kekuatannya kembali. Pada tahun 1996, demonstrasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat Indonesia (PDI) yang dipimpin oleh Megawati, putri dari Sukarno juga diberhentikan dan diperlakukan sama seperti sebelumnya.<sup>85</sup>

Dibawah pemerintahan Presiden Yudhoyono, Indonesia dianggap gagal dalam menangani proses peradilan terhadap tindakan

---

<sup>83</sup> Ibid, halaman 8

<sup>84</sup> ibid

<sup>85</sup> Ibid, halaman 8

sewenang-wenang dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dari 34 terdakwa hanya 18 yang dianggap bersalah dan semuanya dibebaskan karena pengajuan banding ke pengadilan, bahkan anggota pasukan keamanan yang terlibat dalam melakukan kekerasan dapat kembali bebas dalam menjalankan tugas mereka bahkan memasuki arena politik. Kekebalan hukum juga tetap berlaku bagi para pelaku penghasut dan pembantaian 1965 sehingga tidak pernah bertanggung jawab atas kejahatan mereka. Mantan Presiden Soeharto sendiri meninggal pada tahun 2008 tanpa pernah diadili atas kejahatan yang dilakukan dibawah pemerintahnya.<sup>86</sup>

Hak sipil para korban tuduhan PKI juga masih ditolak oleh negara. Korban yang merupakan kaum tua atas pembunuhan massal tahun 1965-1966 serta keturunannya yang menjadi korban atas tuduhan dan korban diskriminasi politik oleh negara selama bertahun-tahun juga tidak diakui sebagai korban dan tidak ada tindakan secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa korban juga menolak untuk berbicara ataupun mencari keluarganya yang hilang karena ketakutan akan diberi label sebagai partisipan PKI. Pada tahun 2010 Indonesia menandatangani Konvensi Internasional tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa namun belum diratifikasi membuat para orang-orang tua meminta permintaan dari pemerintah dan pembersihan nama mereka, namun

---

<sup>86</sup> Ibid, halaman 10



pemerintah tetap bungkam.<sup>87</sup> Pada tahun 2011, keturunan dari korban-korban mengambil aksi legal melalui Lembaga Bantuan Hukum untuk membantu mengembalikan hak ekonomi mereka terhadap tempat tinggal, tanah dan dana pensiun, namun tuntutan mereka ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga mempengaruhi sekitar 22.000 orang.<sup>88</sup>

Pengaruh ketakutan dari sikap pemerintah dalam tuduhan terhadap korban PKI ini untuk memberikan kesaksian secara langsung dirasakan tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri, dimana pada saat adanya inisiatif komunitas masyarakat Indonesia untuk memecahkan keheningan akan tragedi 1965-1966 dengan membentuk *International People's Tribunal 1965* (IPT 1965) dengan memberikan dukungan kebebasan berbicara terkait isu ini yang diadakan di Hague pada 10-14 November 2015 karena terlalu beresiko apabila diadakan di Indonesia.<sup>89</sup>

Kebanyakan dari korban ini memberikan pernyataan dengan menggunakan nama samaran dan berada dibalik layar untuk menutupi identitas sesungguhnya karena banyak yang memikirkan keselamatan keluarganya. Seperti salah satu korban yang bernama Titin Rahayu (bukan nama sebenarnya) memutuskan untuk memberikan pernyataan dibalik layar karena ketakutan yang dialami

---

<sup>87</sup> Ibid, halaman 10

<sup>88</sup> ibid

<sup>89</sup> Marching, Soe Tjen. 2017. *The End of Silence: Accounts of the 1965 Genocide in Indonesia*. Asian History. Amsterdam : Amsterdam University Press halaman 33 [online] <http://en.aup.nl/download/Look%20Inside%20The%20End%20of%20Silence%209789048534364.pdf> diakses pada 14 Desember 2017

akan menimpa keluarganya juga, dalam kesaksiannya Titin menjelaskan bagaimana dia dipenjara, disiksa dan diperkosa. Para korban yang tinggal diluar negeri dan menjadi warga asing juga melakukan hal yang sama karena adanya ketakutan yang akan menimpa keluarga mereka yang berada di Indonesia apabila menunjukkan identitas aslinya, seperti yang dijabarkan oleh Aminah (bukan nama sebenarnya) yang sekarang menjadi warga Bulgaria. Aminah mengatakan bahwa hingga sampai sekarang beberapa keluarganya masih menolak dan mengakui keberadaan Aminah. Walaupun adanya keraguan dalam mengungkapkan identitasnya, namun keberanian korban-korban dalam menceritakan kisah mereka, telah menimbulkan kekhawatiran beberapa pejabat tinggi di pemerintahan Indonesia serta kroni dari Orde Baru.<sup>90</sup>

#### **4.2 Benih-Benih Koalisi Masyarakat Hingga Akhirnya Membuka Isu Ini Kembali di Level Internasional**

Tragedi pembantaian ini kemudian mulai mencuat dan diteliti kembali pasca jatuhnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan Republik Indonesia. Ditandai dengan munculnya organisasi yang bernama Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65). Organisasi ini berdiri pada tahun 1999 yang mana berkomitmen untuk melakukan penelitian, menyelidiki dan menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti adanya genosida di berbagai daerah di seluruh Indonesia oleh tentara yang terjadi sejak tahun 1965.<sup>91</sup> Selain itu pada tahun 2015 dibentuklah wadah resmi yang bernama IPT 1965 atau *International*

---

<sup>90</sup> Ibid, halaman 33

<sup>91</sup> Diambil dari <http://ypkp1965.org/>

*People Tribunal 1965* dimana mereka memulai debut mereka dengan menggelar sidang di Nieuwe Kerk, Den Haag, 10-13 November 2015. Tujuan dari IPT65 ini adalah untuk membawa kasus ini ke ranah internasional sehingga akan mendapat perhatian publik dan pemerintah Indonesia secara khusus.<sup>92</sup>

Peristiwa ini semakin mendapat perhatian terlebih dari masyarakat internasional terlebih ahli studi, peneliti dan juga pengamat negara-negara di Asia dan khususnya Indonesia. Seperti contohnya salah satu pengamat masalah Indonesia asal Belanda, Profesor Dr Gerry Van Klinken yang menyatakan terdapat 3 faktor mengapa IPT 65 mendapat perhatian besar dari publik internasional.<sup>93</sup> Tiga faktor tersebut adalah:

- a. Karena kasus yang sudah menginjak angka setengah abad, sehingga suasana reformasi kental terasa sehingga kesempatan untuk meninjau kembali “Mau kemana Indonesia sebagai suatu bangsa, meninjau kembali ke belakang dan juga ke depan”<sup>94</sup>
- b. Di tingkat internasional, terdapat film-film arahan Joshua Oppenheimer yang kemudian banyak dipuji oleh orang-orang yang tidak terlalu memahami mengenai Indonesia, film-film tersebut adalah *‘The Act of Killings’* dan *‘The Look of Silence’* yang menceritakan mengenai pembunuhan dan pergolakan politik yang terjadi di tahun 1965<sup>95</sup>
- c. Adanya sejumlah ilmuwan dan sejarawan yang berusaha untuk mendalami

<sup>92</sup> Diambil dari <http://www.tribunal1965.org/apa-itu-ipt-1965/>

<sup>93</sup> Bonasir, Rochmatin. 2015. IPT Den Haag 'bantu internasionalisasi' kasus 1965. BBC Indonesia. Diambil dari [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/11/151112\\_indonesia\\_sidang65\\_diplomasi](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151112_indonesia_sidang65_diplomasi)

<sup>94</sup> Ibid

<sup>95</sup> Ibid

apa yang terjadi dalam peristiwa 1965 dan ingin memasyarakatkan temuan-temuannya tersebut<sup>96</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa membahas peristiwa 1965 yang notabene dianggap sebagai masalah yang tabu untuk diperbincangkan di kalangan masyarakat Indonesia dan juga belum adanya proses hukum yang terjadi dalam penyelesaian kasus ini. Sehingga terdapat kemungkinan dengan diselenggarakannya simposium di Belanda tersebut akan meningkatkan minat internasional terhadap kasus 1965 ini.<sup>97</sup> Beberapa saksi yang kemudian hadir dalam Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag menyatakan bahwa dengan jalur internasional ini mungkin dapat membantu dalam mengungkapkan kebenaran yang terjadi di masa itu, meskipun kesaksian mereka tersebut mendapat respon yang negatif dari masyarakat Indonesia sendiri. Akan tetapi, apapun keputusan sidang rakyat IPT 65 ini hasilnya tidak mengikat karena tidak diselenggarakan oleh lembaga peradilan resmi seperti Mahkamah Kejahatan Perang.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Ibid

<sup>97</sup> Ibid

<sup>98</sup> Ibid

### 4.3 *International People's Tribunal 1965 (IPT65)*

*International People's Tribunal 1965* untuk pertama kali muncul secara publik ketika diselenggarakannya sidang di Den Haag, Belanda tahun 2015 lalu.<sup>99</sup> Fokus dari *International People's Tribunal 1965* (Pengadilan rakyat internasional) ini adalah tentang pengakuan HAM atas kasus kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran HAM di tahun 1965. Gagasan untuk menyelenggarakan pengadilan rakyat internasional ini yaitu sebagai respon terhadap aksi G30S dan peristiwa setelahnya, 1 Oktober 1965.<sup>100</sup> Sebelumnya pernah diadakan pengadilan serupa di Rwanda yaitu *International Criminal Tribunal for Rwanda*, *International Tribunal for The Law of The Sea* dan *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*.

Adapun persidangan IPT 65 yang berlangsung selama 4 hari di Den Haag pada tanggal 10-13 November 2015. Dalam beberapa bulan sebelum persidangan, mereka telah menerima dakwaan dan catatan penuntut serta serangkaian bahan sebagai latarbelakang tuntutan.<sup>101</sup> Dalam empat hari persidangan, mereka mendengar tuntutan yang disampaikan para penuntut secara lisan, kesaksian dan jawaban pertanyaan dari 20 saksi yang beberapa di antaranya meminta disembunyikan identitasnya. Para hakim juga menerima ratusan lembar dokumen yang berisi bukti. Penuntut menyampaikan kasus mereka dalam sembilan tuntutan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, antara lain: pembunuhan, perbudakan,

---

<sup>99</sup> International People's Tribunal 1965. "Apa itu IPT 1965?". (Online) diakses pada 20 November 2017 melalui <http://www.tribunal1965.org/apa-itu-ipt-1965/>

<sup>100</sup> International People's Tribunal 1965, "Narrative Report of the IPT1965", (Online) diakses pada 1 Desember 2017 <http://www.tribunal1965.org/en/narrative-report-of-the-ipt-1965/>

<sup>101</sup> Tribunal 1965. 2016. Laporan Sidang. Diambil dari <http://www.tribunal1965.org/tribunal-1965/laporan-sidang/>



pemenjaraan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan secara paksa, propagandan kebencian, dan juga keterlibatan negara-negara lain.<sup>102</sup>

Namun amat disayangkan selama empat hari peradilan, tidak ada perwakilan dari pemerintah Indonesia yang datang untuk menyambut undangan sidang dan ataupun berpendapat mengenai persidangan IPT65 ini. Begitu juga tidak hadirnya perwakilan dari negara-negara yang telah resmi diundang dalam persidangan IPT65, yakni negara Amerika Serikat, Inggris, dan juga Australia. Meskipun demikian para hakim Pengadilan Rakyat Internasional menyambut baik kesediaan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Perempuan untuk angkat bicara dalam persidangan.<sup>103</sup>

Selain itu, perlu dicatat bahwa Indonesia telah mengambil beberapa langkah penting meski tidak menyeluruh untuk menanggapi permasalahan ini. Dimana pada tahun 2000 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur, presiden terpilih pertama setelah Presiden Soeharto yang mengundurkan diri di tahun 1998) membahas secara panjang lebar dalam sebuah wawancara TV mengenai korban G30S-PKI dan menyarankan agar pemerintahannya menyambut pembukaan kasus tersebut guna mengetahui kebenaran dari apa yang terjadi kala itu.<sup>104</sup> Beliau juga mengakui bahwa para anggota ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) kala dulu juga turut andil dalam peristiwa pembunuhan masyarakat PKI ataupun yang dituduh PKI tersebut dan mengatakan bahwa beliau telah meminta maaf atas tindakan mereka tersebut. Akan tetapi setelah itu terjadi demo penolakan besar-besaran dari rakyat

---

<sup>102</sup> Ibid

<sup>103</sup> Ibid

<sup>104</sup> Diambil dari <http://www.tribunal1965.org/en/final-report-of-the-ipt-1965/>

Indonesia, sehingga Presiden Abdurrahman Wahid belum sampai melakukan permohonan maaf secara resmi.<sup>105</sup>

Selanjutnya merupakan Presiden Joko Widodo (yang menjabat sejak 20 Oktober 2014) telah berjanji untuk menangani pelanggaran HAM masa lalu termasuk peristiwa tahun 1965 selama masa kampanye pemilihannya. Hal ini memang secara eksplisit disebutkan dalam programnya Nawacita (sembilan aspirasi). Namun hal ini kemudian diturunkan dari daftar prioritasnya. Jaksa Agung, H.M. Prasetyo, menyatakan bahwa "solusi permanen" harus diupayakan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah lamaterjadi termasuk "tragedi 1965".<sup>106</sup> Namun beliau berkeras bahwa solusi ini hanya akan dicari dalam rekonsiliasi saja. Pemerintah Indonesia sejauh ini mengabaikan fase pencarian kebenaran tanpa rekonsiliasi yang nilainya kecil. Martabat korban dan keluarga mereka hanya bisa dipulihkan, dan upaya lain untuk memperbaiki ingatan historis hanya dapat dilakukan begitu penemuan kebenaran dianggap serius. Hal ni akan memperkuat *rule of law* di Indonesia dan membantu memastikan kekejaman peristiwa tersebut agar tidak akan terulang kembali.<sup>107</sup>

Pemerintah Indonesia tidak hanya menggagalkan atau melarang semua upaya untuk mengetahui tingkat kejahatan massal terhadap kemanusiaan yang dilakukan setelah 30 September 1965, namun juga melarang semua diskusi mengenai tema sosialis secara efektif. Studi tentang Marxisme, Leninisme dan Komunisme dilarang dan buku teks sejarah untuk anak sekolah ditulis ulang oleh militer dan hal tersebut juga masih belum direvisi. PKI dan semua organisasi afiliasinya yang dilarang pada tahun 1966 dan pada masa rezim Orde Baru (1966-

---

<sup>105</sup> Ibid

<sup>106</sup> Ibid

<sup>107</sup> Ibid

1998). Larangan ini diperluas ke semua gerakan pro-demokrasi dan ormas, dan larangan tersebut belum direvisi ataupun dihapuskan.<sup>108</sup>



---

<sup>108</sup> Ibid

## BAB V

### ANALISIS *TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS* KORBAN

#### PELANGGARAN HAM TRAGEDI G30SPKI OLEH IPT65

Dalam menganalisa perjuangan masyarakat korban pelanggaran HAM tragedi G30SPKI di tingkat internasional melalui pendekatan konsep *Transnational Advocacy Network*, maka diperlukan beberapa tahapan. Pembahasan bab ini akan dibagi ke dalam jenjang subbab. Pembahasan subbab pertama yakni mengenai latar belakang munculnya aksi koalisi masyarakat korban pelanggaran HAM tragedi G30SPKI, lambatnya respon pemerintah Indonesia terhadap kasus pelanggaran HAM ini menyebabkan terhambatnya saluran aspirasi antara koalisi masyarakat dengan pemerintah Indonesia.

Penjelasan pada subbab selanjutnya yakni mengenai proses dan strategi yang dilakukan oleh koalisi masyarakat korban pelanggaran HAM tragedi G30SPKI untuk memperoleh dukungan dari dunia Internasional. Adapun strategi yang digunakan adalah melakukan advokasi melalui *International People's Tribunal 1965* (IPT65) di Den Haag, Belanda. Kemudian bab ini akan ditutup dengan hasil sidang IPT65 yang menyatakan Indonesia bersalah atas kejahatan HAM tahun 1965-1966 yang akhirnya mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka kembali pembahasan kasus penegakan HAM melalui Simposium Tragedi 1965 oleh Lemhanas.

*Network* merupakan suatu bentuk organisasi yang ditandai dengan pola komunikasi dan pertukaran sukarela, timbal balik dan horizontal.<sup>109</sup> Terlepas dari perbedaan antara dunia domestik dan internasional, konsep jaringan berjalan dengan baik karena menekankan hubungan yang lancar dan terbuka antara aktor yang berkomitmen dan berpengetahuan di bidang isu khusus. Hal itulah yang kemudian disebut dengan jaringan advokasi karena pendukung membela penyebab orang lain atau membela penyebab proposisi. Advokasi melihat apa yg unik dari jaringan transnasional ini: mereka dibentuk untuk mempromosikan (mempopulerkan) isu, pandangan, dan norma yang tentunya seringkali menyangkutkan seorang individu.<sup>110</sup>

Jaringan advokasi sendiri bukanlah hal yang baru. Hal ini sudah ada sejak abad ke-19 tentang kampanye penghapusan sistem perbudakan. *Transnational Advocacy Network* seringkali muncul dalam isu tentang: (1) tertutupnya akses antara grup domestik dengan pemerintahan mereka atau suatu *channel* yang tidak efektif dalam menyelesaikan konflik, yang kemudian di analisa dengan menggunakan *the boomerang pattern*, (2) para aktivis atau entrepreneur politik mempercayai bahwa melalui *networking* dapat memperluas misi dan kampanye mereka serta mempromosikan jaringan mereka, (3) dengan adanya *networks* para aktivis dapat membentuk dan memperkuat jaringan melalui konferensi atau bentuk pertemuan internasional lainnya.<sup>111</sup>

Sesuai dengan fokus dari jejaring advokasi transnasional seperti yang telah disebutkan diatas, jejaring advokasi transnasional telah sering berhasil mengubah

---

<sup>109</sup> Margaret Keck dan Kathryn Sikkink, *Op.Cit.*, halaman 91

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*



kebijakan maupun perilaku negara atau aktor lain. Seperti misalnya isu tentang *Detox Campaign on Fashion* di Tiongkok yang dilakukan oleh *Greenpeace* yang akhirnya berhasil menekan pemerintah Tiongkok untuk mengubah kebijakan mereka terkait pembuangan limbah perindustrian tekstil.

### 5.1 Information Politics Indonesia

*Information Politics* merupakan salah satu variabel dari konsep *Transnational Advocacy Network* yang menggerakkan informasi politik agar berguna secara cepat dan tepat terhadap suatu area yang paling berdampak pada informasi politik tersebut. Para aktor jejaring advokasi transnasional memberikan informasi yang tidak dapat bebas di luar, sumber-sumber informasi yang jarang dan berguna bagi aktivis lainnya<sup>112</sup> sehingga setiap aktor dapat bertukar informasi untuk memperkuat jejaring dan gerakan tekanan terhadap pemerintah

Dalam konsep *Transnational Advocacy Networks* dengan variabel *Information Politics*, terdapat tiga indikator yaitu:

1. *Network Effectiveness*
2. *Testimonies*
3. *Media*

Untuk memahami lebih lanjut isu pelanggaran HAM tragedi G30SPKI dapat dilihat dalam penjabaran dibawah ini:

#### 5.1.1 Indikator *Network Effectiveness* dan Operasionalisasinya

*Network effectiveness* merupakan salah satu cara bagi aktor *Transnational Advocacy Network* untuk mendapatkan informasi secara lebih cepat tanpa ada

---

<sup>112</sup> Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, *Op.Cit.*, halaman 95

campur tangan dari pemerintah.<sup>113</sup> Peran informasi disini membantu untuk membentuk jaringan. Jenis informasi yang didapat merupakan informasi yang tidak tersedia secara umum.<sup>114</sup>

Tepat pada tanggal 30 September 50 tahun yang lalu terjadi rangkaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sekelompok orang dari kalangan sipil dan militer Indonesia telah melakukan aksi pembunuhan terhadap 6 petinggi militer Indonesia dan perwira menengah di Jakarta, yang kemudian tragedi ini disebut dengan peristiwa Gerakan 30 September. Soeharto yang saat itu menjabat presiden Republik Indonesia menyebut PKI sebagai penyebab terjadinya peristiwa G30S.

Beberapa hari setelah peristiwa G30S terjadi aksi penculikan, penahanan bahkan pembunuhan terhadap ratusan ribu orang yang dianggap sebagai pengurus, anggota dan simpatisan dari PKI atau organisasi terkait. Menurut wawancara yang dilakukan oleh tim VOA dengan salah satu mantan tahanan politik 1965 Badri, pelaku aksi kejahatan HAM terhadap lebih dari 500 orang lebih pasca G30S adalah ABRI.<sup>115</sup>

Tragedi kejahatan HAM 1965 ini tidak terekspos secara terbuka dikarenakan pemerintah menutupi dan cenderung menciptakan sejarah baru. Hal ini yang kemudian diperjuangkan oleh koalisi masyarakat korban pelanggaran HAM tragedi 1965, untuk membuka fakta-fakta yang selama ini disembunyikan dari masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan *network effectiveness* koalisi

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Andylala Waluyo, "VOA: Upaya Rekonsiliasi dalam Penyelesaian Tragedi 1965", VOA Indonesia, 30 September 2015, (Online) Diakses pada 25 November 2017. <https://www.voaindonesia.com/a/upaya-rekonsiliasi-dalam-penyelesaian-tragedi-65-/2985673.html>

masyarakat korban pelanggaran HAM 1965 ini mempersiapkan data-data untuk disajikan pada saat sidang IPT 65, sebagian besar didapatkan dari hasil penelitian beberapa peneliti yang bekerja secara sukarela. Hal ini dilakukan karena IPT 65 tidak mendapatkan akses dari Komnas HAM. Untuk itu sebanyak 40 peneliti baik dari Indonesia maupun internasional dimana dengan lokasi penelitian di 13 provinsi dilakukan pada tahun 2014 dan menghasilkan 1000 lembar hasil penelitian pada tahun 2015. Hasil penelitian ini kemudian di edit kembali oleh koordinator peneliti yaitu Prof. Saskia Wieringa untuk diberikan kepada Jaksa dan Hakim.<sup>116</sup>

#### 5.1.2 Indikator Testimonies dan Operasionalisasinya

Aktor jejaring advokasi transnasional tidak hanya membutuhkan informasi-informasi berupa namun juga membutuhkan *Testimonies*, yaitu kisah atau kesaksian yang diceritakan oleh orang yang telah mengalami isu tersebut, dengan tujuan untuk membujuk orang lain dan mengambil tindakan.<sup>117</sup> Hal ini membutuhkan pesan yang kuat dan jelas yang nantinya akan berdampak pada kebijakan negara.

Testimoni dari para korban menjadi bukti utama terjadinya pelanggaran HAM pada peristiwa G30SPKI. Untuk itu tim jaksa penuntut mempersiapkan video dokumentasi yang menampilkan berbagai testimoni dari korban peristiwa tersebut dimana juga berdasarkan dari hasil tim penelitian. Selain video, pada saat pengadilan IPT65 juga menyiapkan saksi untuk hadir dalam sidang yang dipersiapkan oleh koordinator umum. Saksi ini dihadirkan setelah melakukan

---

<sup>116</sup> International People's Tribunal 1965, "Narrative Report of the IPT1965", (Online) diakses pada 1 Desember 2017 <http://www.tribunal1965.org/en/narrative-report-of-the-ipt-1965/>

<sup>117</sup> Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, *Op.Cit.*, halaman 96

berbagai konsultasi dan pertemuan-pertemuan dengan saksi langsung maupun saksi ahli. Yang dimaksud dengan saksi langsung adalah para korban, para korban yang selamat, para pelaku, dan yang menyaksikan langsung terjadinya peristiwa pembantaian. Sedangkan saksi ahli adalah para peneliti maupun ahli yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai pembantaian pada peristiwa 1965 dimana terdapat satu saksi ahli untuk tiap tuntutan yang diajukan.

Saksi yang dihadirkan dalam sidang sejumlah 7 orang dimana untuk alasan keamanan ada beberapa yang memakai nama samaran. Saksi tersebut yaitu Astaman Hasibuan (Medan), Bedjo Untung (Tangerang), Basuki Bowo (samaran, Jakarta), Martin Aleida (Jakarta), Kinkin Rahayu (samaran, Jogjakarta), Intan Permatasari (samaran, Kupang) and Muhammad Pakasi (Menado). Saksi ahli yang dihadirkan juga terdapat 7 orang. Saksi ahli yang merupakan peneliti yaitu Asvi Warman Adam (Indonesia Science Institute, Jakarta), Saskia Wieringa (Amsterdam University), Wijaya Herlambang (Jakarta), Bradley Simpson (Princeton University), Leslie Dwyer (Princeton University) dan Ibu Ngati (samaran). Peneliti ini merupakan para ahli dalam 9 tuntutan dalam sidang yaitu pembunuhan, perbudakan, deportasi, penghilangan paksa, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya, persekusi berupa pembatalan atau penolakan passpor, persekusi berupa propaganda kebencian, dan keterlibatan dari negara lain. Selain peneliti juga dihadirkan saksi ahli dalam bidang film Ferry Putra (samaran, pembuat film dokumenter).<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> International People's Tribunal 1965, "Narrative Report of the IPT1965", (Online) diakses pada 1 Desember 2017 <http://www.tribunal1965.org/en/narrative-report-of-the-ipt-1965/>

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan internasional ini menjadi elemen yang kuat karena saksi yang dihadirkan adalah para korban pelanggaran HAM 1965 yang langsung mengalami tragedi tersebut.

#### 5.1.2 Indikator Media dan Operasionalisasinya

Selanjutnya, media menjadi platform penting bagi aktor jejaring advokasi transnasional yaitu untuk menarik jangkauan audiens yang lebih luas.<sup>119</sup> Di era saat ini dimana masyarakat dapat mengakses berita dan informasi secara lebih cepat melalui media, terutama media online. Melihat hal ini, IPT65 memilih untuk menggunakan media online dalam menyebarkan informasi terkait proses pengadilan internasional tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tahun 1965. IPT65 berusaha memaksimalkan penggunaan media online agar lebih mudah dalam meraih seluruh lapisan masyarakat. Namun, tidak hanya media online, IPT65 juga menggunakan media analog seperti pemutaran film dokumenter melalui festival film.

Tahun 2013 “*Festival Movies That Matter*” yang merupakan festival film dokumenter dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Sineas muda Indonesia, Joshua Oppenheimer mengikutsertakan karya filmnya yang berjudul “*The Act of Killing*” atau Jagal pada festival tersebut yang kemudian mengusik kebangkitan nasional dan internasional.<sup>120</sup> Film dokumenter tersebut mampu meraih berbagai penghargaan maupun nominasi penghargaan di berbagai festival film di beberapa penjuru dunia bahkan masuk dalam nominasi Oscar, memberikan dorongan dan membantu usaha dari IPT65 untuk membawa agendanya sehingga mendapatkan

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> International People’s Tribunal 1965. “Apa itu IPT 1965?”. (Online) diakses pada 20 November 2017 melalui <http://www.tribunal1965.org/apa-itu-ipt-1965/>



perhatian dari dunia secara lebih luas. Kelanjutan film *“The Act of Killing”* yang melihat dari segi pelaku pembantaian yaitu *“The Look of Silence”* yang melihat dari segi korban dan keluarga korban pembantaian sehingga memberikan pandangan yang lebih mendalam terkait dengan peristiwa G30SPKI khususnya dari segi HAM.

Seusainya pemutaran film tersebut, panitia mengadakan diskusi yang dihadiri oleh 35 orang Warga Negara Indonesia yang dianggap sebagai simpatisan PKI 1965 beserta Joshua Oppenheimer. Dalam diskusi tersebut muncul topik bahasan bagaimana upaya penegakan HAM terkait tragedi kejahatan HAM 1965. Sebelumnya telah dilakukan berbagai upaya yang dilakukan oleh koalisi masyarakat dengan pemerintah Indonesia, seperti misalnya pembentukan komite rekonsiliasi kasus HAM masa lalu dan merilis laporan KOMNAS HAM di tahun 2012 namun kedua hal tersebut tidak menghasilkan solusi.

Kegagalan pemerintah Indonesia dalam menemukan solusi terkait kasus pelanggaran HAM tragedi G30SPKI, semakin menguatkan gagasan koalisi masyarakat yang pada saat itu berada di Den Haag, Belanda, untuk membawa kasus kejahatan HAM ini ke ranah Internasional yaitu melalui aksi advokasi IPT65 untuk memberikan tekanan Internasional kepada Indonesia.

Setelah didirikannya IPT65 pada tahun 2013, terdapat beberapa badan penunjang atau kesekretariatan untuk menjalankan fungsi dari IPT 65 tersebut. Media menjadi salah satu bagian tersebut dimana dikoordinasikan oleh Lea Pamungkas. Tim media ini bekerja di dua tempat yaitu di Jakarta dan Belanda.



Selain itu juga muncul badan lainnya yang fokus kepada kampanye dan media kreatif dimana dikoordinasikan oleh Dolorosa Sinaga.<sup>121</sup>

Dalam memberikan informasi, IPT65 memiliki beberapa media yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat luas. Media tersebut yaitu situs website dengan alamat yaitu <http://www.tribunal1965.org>. Situs resmi ini diluncurkan pada 17 Desember 2014 dimana peluncurannya dilakukan di Jakarta dan juga Amsterdam. Pengoperasian dari situs ini juga melibatkan kedua tim dari Jakarta dan Belanda.<sup>122</sup>

Selain memiliki situs resmi, IPT65 juga memiliki beberapa media sosial yaitu media sosial facebook yang dapat diakses pada [https://web.facebook.com/IPT1965/?ref=br\\_rs](https://web.facebook.com/IPT1965/?ref=br_rs), media sosial twitter <https://twitter.com/IPT1965> atau @IPT65, youtube dapat diakses pada halaman [https://www.youtube.com/channel/UCWW8cSJGoOK\\_XmVcLTeyjUA](https://www.youtube.com/channel/UCWW8cSJGoOK_XmVcLTeyjUA), dan flickr <https://www.flickr.com/people/136612219@N04/>.

---

<sup>121</sup> International People's Tribunal 1965, "Narrative Report of the IPT1965", (Online) diakses pada 1 Desember 2017 <http://www.tribunal1965.org/en/narrative-report-of-the-ipt-1965/>

<sup>122</sup> *Ibid.*

Gambar 5. 1 Media Informasi Politik dari IPT65



Sumber: Situs Resmi Tribunal 1965

Media tersebut memberikan informasi-informasi, laporan, dan hal hal lainnya yang berkaitan dengan peristiwa G30SPKI maupun perkembangan kasusnya. Penggunaan bahasa dalam menyajikan artikel, berita dan penyajian informasi lainnya yaitu dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk menjangkau tidak hanya penduduk Indonesia sendiri tetapi juga masyarakat internasional.

## 5.2 Symbolic Politics Indonesia

Selanjutnya *Symbolic Politics* merupakan strategi di mana aktivis mem-*framing* atau melakukan suatu tindakan yang masuk akal akan suatu situasi. *Framing* isu tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi dan memberikan keyakinan dalam berbagai aktivitas simbolik sehingga dengan strategi *symbolic politics* menjadi pemicu untuk memperkuat jejaring dengan meyakinkan kesadaran akan isu yang dikemukakan.

### 5.2.1 Indikator *Framing* dan Operasionalisasinya

Para aktor jejaring advokasi transnasional membingkai suatu isu dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan bagi pertumbuhan jaringan, dimana hal ini menjadi bagian dari proses persuasi.<sup>123</sup> Tindakan *framing* biasanya dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat dan berusaha menyampaikan informasi. Dalam hal ini IPT65 melakukan secara domestik dan internasional. Berbagai kegiatan dan kampanye dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait tragedi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tahun 1965.

Untuk mengangkat isu peristiwa 1965, IPT65 mengadakan beberapa kegiatan dalam membahas peristiwa pelanggaran HAM 1965 dengan target masyarakat baik di Indonesia maupun diluar negeri. Kegiatan tersebut diantaranya dengan melakukan kampanye. Kampanye ini dapat dilihat pada kegiatan seminar yang dilakukan di Jerman mengenai kekerasan tahun 2013, seminar yang dilaksanakan di Den Haag pada tahun 2015, seminar di Amsterdam tahun 2015 beserta peluncuran buku “Pulang” oleh Leila Chudori, kegiatan dialog dengan Martin Aleida sebagai mantan tahanan politik dan saksi di Belanda, Jerman, dan

---

<sup>123</sup> Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, *Op.Cit*, halaman 96

Perancis, mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan dengan organisasi atau institusi lainnya seperti ikut dalam presentasi dalam acara “*The Week Against Colonialism*” di Paris Februari 2015.<sup>124</sup>

Anggota pelaksana IPT65 juga hadir dan juga turut menjadi pembicara dalam berbagai konferensi internasional seperti konferensi tentang kajian Asia Tenggara oleh EUROSEAS di Universitas Vienna, Austria pada 11-14 Agustus 2015 dan workshop mengenai pembantaian 1965 di Bonn pada 24-25 Oktober 2015 bekerjasama dengan *Southeast Asian Center* dari Universitas Bonn. Selain itu juga mengadakan berbagai kegiatan mengenang peristiwa 1965 bertajuk “50 years after 1965” pada bulan September hingga Desember 2015 di Belin yang bekerjasama dengan Watch Indonesia berupa konferensi, festival film, dan aksi kartu ucapan.<sup>125</sup> Panitia pelaksana IPT65 juga menjadi tamu untuk melakukan diskusi panel dan *talkshow* pada Human Rights Film Festival Movies that Matter bulan Maret 2015 di Den Haag, Tong Tong Festival bulan Mei/Juni 2015 di Den Haag, dan juga pada acara *Netherlands Institute for War Holocaust and Genocide Studies* (NIOD).<sup>126</sup>

Sedangkan di Indonesia, IPT65 berusaha untuk mendapatkan dukungan dari tokoh agama, tokoh politik dan aktivis HAM lainnya. Hal ini dilakukan dengan berbagai kegiatan baik pertemuan dan kolaborasi kegiatan. Seperti pertemuan dengan Solahudin Wahid dari NU sehingga terdapat Halaqah dengan para korban dan saksi dari peristiwa 1965, perwakilan komnas HAM, dewan penasihat

---

<sup>124</sup> International People’s Tribunal 1965, “Narrative Report of the IPT1965”, (Online) diakses pada 1 Desember 2017 <http://www.tribunal1965.org/en/narrative-report-of-the-ipt-1965/>

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*



presiden, NGO lainnya seperti KONTRAS, AJAR, IKOHI, APIK, LPH, YAPHI, dan JPIT, dan juga kedutaan Australia. Kampanye informasi mengenai peristiwa pelanggaran HAM 1965 juga dilakukan dengan bekerjasama baik dengan NGO lain maupun dengan beberapa universitas di Indonesia maupun organisasi korban 1965 dengan target utama yaitu para pelajar dan pemuda di beberapa kota di Indonesia.<sup>127</sup> IPT65 juga mendekati beberapa media di Indonesia seperti Harian Kompas, Kompas TV, Tempo, Sinar Harapan, Aliansi Jurnalis dan Dewan Press Indonesia untuk memberikan informasi mengenai pengadaan sidang pengadilan *International People's Tribunal* dalam peristiwa pelanggaran HAM 1965 maupun sebelumnya mempublikasikan informasi berkaitan dengan keterlibatan dari CIA.

128

### 5.3 Leverage Politics Indonesia

Selanjutnya *leverage politics* merupakan strategi yang dilakukan oleh aktor untuk menekan aktor negara melalui instrumen dukungan dari aktor yang lebih kuat. Dalam strategi *leverage politics*, terdapat dua pendekatan yakni *material leverage* dan *moral leverage*.

#### 5.3.1 Indikator Material Leverage dan Operasionalisasinya

*Material leverage* merupakan salah satu pendekatan *leverage politics* yang terkait dengan bantuan atau donasi yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, para aktivis tersebut akan berjuang untuk mengusahakan para aktor negara membatasi atau memotong anggaran yang dianggap berkontribusi terhadap

---

<sup>127</sup> International People's Tribunal 1965, "Narrative Report of the IPT1965", (Online) diakses pada 1 Desember 2017 <http://www.tribunal1965.org/en/narrative-report-of-the-ipt-1965/>

<sup>128</sup> *Ibid.*

sumber masalah. Dengan demikian, dana tersebut justru dapat digunakan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang mengemuka tersebut.<sup>129</sup>

Untuk isu advokasi internasional *Transnasional Advocacy Network* korban pelanggaran HAM 195 ini tidak ditemukan adanya indikator *material leverage*.

### 5.3.2 Indikator Moral Leverage dan Operasionalnya

Sedangkan *moral leverage* dalam strategi *leverage politics* yakni di mana para aktivis membentuk *mobilisation of shame*. Tujuan dari dibentuknya *mobilisation of shame* yakni bertujuan untuk mengubah perilaku negara atau aktor lain. Sehingga para aktor tersebut kemudian akan mengubah perilaku mereka untuk dapat memperoleh *prestige* di pergaulan internasional.<sup>130</sup>

Salah satu tujuan dari diadakannya *International People's Tribunal* (IPT 1965) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat internasional secara lebih luas tentang isu kejahatan kemanusiaan tahun 1965 dengan cara memobilisasi dukungan internasional.<sup>131</sup> Adapun cara untuk memperoleh dukungan secara internasional yaitu sebagai berikut menghubungi kementerian luar negeri Belanda dan organisasi-organisasi hak asasi manusia di Belanda yang telah menunjukkan ketertarikannya akan isu pelanggaran HAM di Indonesia, seperti misalnya *Amnesty International* dan Tapol (London). Kemudian mengirimkan surat ke advokat hak asasi manusia terkemuka seperti misalnya Jimmy Carter dan Desmond Tutu. Dan yang terakhir adalah pengiriman surat pendukung yang ditujukan kepada senator Amerika Serikat, Tom Udall yang berisi tentang

---

<sup>129</sup> Margaret Keck dan Kathryn Sikkink, *Op.Cit*, halaman 97

<sup>130</sup> Margaret Keck dan Kathryn Sikkink, *Op.Cit.*, halaman 97-98

<sup>131</sup> International People's Tribunal 1965, "*Narrative Report of the IPT1965*", (Online) diakses pada 1 Desember 2017 <http://www.tribunal1965.org/en/narrative-report-of-the-ipt-1965/>



pengajuan resolusi sidang ke-113 Kongres Amerika Serikat mengenai perlunya rekonsiliasi di Indonesia dan pengungkapan pemerintah Amerika Serikat tentang peristiwa pelanggaran HAM 1965.<sup>132</sup> Hal ini kemudian yang akan menjadi *mobilisation of shame* bagi Indonesia karena adanya berbagai desakan secara internasional bagi pemerintahan Indonesia. Dengan adanya desakan secara internasional ini juga dapat merusak citra positif Indonesia dalam mengatasi masalah penegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu karena tertutupnya akses komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan gerakan masyarakat penegak HAM, timbullah *pressure* seperti ini yang berakibat kepada Indonesia sendiri seperti *boomerang pattern*.

#### 5.4 Accountability Politics Indonesia

Dan yang terakhir adalah *accountability politics*, yakni merupakan strategi yang menjadi tolok ukur bagi para aktor dengan parameter aktor lain akan patuh atau tidak untuk melakukan kebijakan yang telah didukung oleh aktor yang lebih kuat.<sup>133</sup>

##### 5.4.1 Indikator Network dan Operasionalnya

Peran *network* dalam konsep jejaring advokasi transnasional ini adalah untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk mengubah posisi mereka dalam suatu isu. Hadirnya IPT65 yang dalam pelaksanaannya memiliki jaringan koneksi yang tidak sedikit untuk mengatasi permasalahan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini semakin memperkuat IPT65 untuk meyakinkan dan memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia tahun 1965.

---

<sup>132</sup> Margaret Keck dan Kathryn Sikkink, *Op.Cit.*

<sup>133</sup> *Ibid*, halaman 98

Dengan banyaknya dukungan yang diterima oleh *International People's Tribunal* (IPT65) ini dan adanya desakan terkait kasus pelanggaran HAM 1965 di Indonesia, menyebabkan munculnya tekanan bagi pemerintah Indonesia. Yang kemudian diselenggarakannya Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang diadakan 18-19 April 2016 di Jakarta.<sup>134</sup> Adapun peserta yang turut hadir dalam simposium tersebut adalah kementerian/lembaga, individu, organisasi masyarakat, partai politik, perwakilan dari universitas, dan perwakilan media.<sup>135</sup>

Pelaksanaan Simposium Nasional ini menjadi bukti bahwa usaha gerakan masyarakat penegak hak asasi manusia tragedi 1965, dengan menggunakan empat strategi *Transnasional Advocay Network* berhasil memperoleh respon secara internasional melalui diadakannya *International People's Tribunal* 1965.

---

<sup>134</sup> Abi Sarwanto dan Prima Gumilang, "*Live: Simposium Nasional Tragedi 1965*", CNN Indonesia 18 April 2016, (Online) Diakses pada 1 Desember 2017  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160418085757-20-124594/live-simposium-nasional-tragedi-1965/>

<sup>135</sup> *Ibid.*

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Peristiwa G30SPKI merupakan peristiwa dimana terdapat sekelompok orang yang ingin menggantikan ideologi negara dengan paham lain yaitu komunisme oleh PKI. Penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal militer di lubang buaya menjadi titik balik dari peristiwa ini. Hal ini merupakan apa yang diajarkan kepada publik umum. Namun setelah peristiwa ini, terdapat banyak orang yang menderita dijadikan sebagai kriminal dimana mendapatkan perlakuan kasar, dibuang, dihilangkan paksa, hingga dibunuh karena dianggap sebagai para pendukung PKI. Peristiwa ini dapat dikategorikan kedalam kejahatan kemanusiaan. Dan hal ini tidak banyak dibahas bahkan pemerintah Indonesia tidak terbuka akan hal ini khususnya pada masa Orde Baru. Setelah lengsernya Presiden Soeharto atau runtuhnya masa Orde Baru menjadi Reformasi, peristiwa 1965 kembali mencuat.

Salah satu yang mengangkat peristiwa 1965 ke permukaan adalah IPT65 (*International People's Tribunal*/ Pengadilan Rakyat Internasional 1965). Tujuan dari IPT65 ini adalah menegakan HAM bagi mereka yang menjadi korban dalam peristiwa 1965. Munculnya IPT65 sendiri karena tidak puas dengan pemerintah Indonesia yang bungkam atau hanya menjanjikan untuk membuka peristiwa 1965. Untuk itu, IPT65 berusaha mengangkat peristiwa 1965 ini ke ranah internasional agar dapat mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan kongkret dalam menanggapi peristiwa 1965 khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Hal ini juga melihat pengadilan rakyat internasional

sebelumnya yang dilakukan oleh Rwanda dan Yugoslavia. Pengangkatan peristiwa 1965 ini ke ranah internasional juga diperkuat dengan perhatian internasional terhadap film *"The Act of Killing"* mengenai apa yang terjadi pada tahun 1965.

Untuk itu, penulis ingin mengetahui advokasi yang dilakukan oleh IPT65 untuk memperjuangkan hak-hak dari para korban peristiwa 1965 sehingga terlaksana pengadilan rakyat internasional tersebut pada tahun 2016. Untuk melihat advokasi yang dilakukan IPT65, penulis menggunakan *Transnational Advocacy Network* sebagai alat untuk menganalisa. *Transnational Advocacy Network* yang dipakai adalah tulisan Margaret Keck dan Kathryn Sikkink dalam buku berjudul *"Transnational advocacy networks in international and regional politics"*. *Transnational Advocacy Network* ini merupakan hubungan yang terjalin antara para aktor internasional yang berasal dari disiplin ilmu baik dari negara maupun non-negara berbeda berinteraksi satu sama lain dimana aktor-aktor tersebut memiliki kesamaan baik dalam ide maupun nilai-nilai prinsip yang dianut. Implikasi dari pola interaksi tersebut membangun sebuah upaya ataupun pergerakan untuk memengaruhi suatu kebijakan, wacana, ataupun peraturan yang diproduksi oleh suatu negara ataupun institusi lainnya. Adapun strategi yang diterapkan dalam jejaring advokasi transnasional dengan tujuan berhasil menekan atau mengubah posisi aktor lain untuk suatu kebijakan yakni antara lain; *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Strategi pertama yaitu *information politics* merupakan strategi untuk menggerakkan informasi politik yang berguna secara cepat dan tepat terhadap

suatu area yang paling berdampak pada informasi politik tersebut. Terdapat 3 komponen dalam *information politics* yaitu *Network Effectiveness*, *Testimonies*, dan Media. *Network Effectiveness* adalah untuk mendapatkan informasi secara lebih cepat tanpa ada campur tangan dari pemerintah yang membantu untuk membentuk jaringan dan jenis informasi yang didapat tidak tersedia secara umum. *Testimonies* yaitu kisah atau kesaksian yang diceritakan oleh orang yang telah mengalami isu tersebut, dengan tujuan untuk membujuk orang lain dan mengambil tindakan dimana membutuhkan pesan yang kuat dan jelas yang nantinya akan berdampak pada kebijakan negara. Media menjadi *platform* penting bagi aktor jejaring advokasi transnasional yaitu untuk menarik jangkauan *audiens* yang lebih luas sehingga terbentuk jaringan dukungan sehingga advokasi yang terjadi memiliki penekanan agar terdapat perubahan sikap oleh negara.

Strategi kedua yakni *symbolic politics* yang merupakan strategi di mana aktivis mem-*framing* atau melakukan suatu tindakan yang masuk akal akan suatu situasi, menggiring masyarakat untuk melihat isu yang diangkat. Strategi ketiga ialah *leverage politics* yakni merupakan strategi yang dilakukan oleh aktor untuk menekan aktor negara melalui instrumen dukungan dari aktor yang lebih kuat. Terdapat dua komponen yaitu *material leverage* dan *moral leverage*. *Material leverage* merupakan pendekatan *leverage politics* yang terkait dengan bantuan atau donasi yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan *moral leverage* dalam strategi *leverage politics* yakni di mana para aktivis membentuk *mobilisation of shame* untuk mengubah perilaku negara atau aktor lain. Kemudian strategi keempat yakni *accountability politics*, yakni merupakan strategi di mana para



aktivis jejaring melakukan suatu usaha dengan tujuan aktor lain akan patuh untuk melakukan kebijakan yang telah didukung oleh aktor yang lebih kuat.

Strategi IPT 65 dalam segi *information politic* dapat dilihat dari ketiga komponen dalam tulisan Margaret Keck dan Kathryn Sikkink yang sudah dijelaskan diatas. Dari *Network Effectiveness*, usaha untuk mengumpulkan data terkait dengan peristiwa 1965 mendapatkan hambatan dari pemerintah sehingga mendorong IPT65 untuk melakukan sendiri pengumpulan data melalui penelitian dimana melibatkan peneliti dari luar maupun dari dalam yang bekerja secara sukarela. *Testimonies* menjadi komponen penting dalam IPT65 terlebih karena berkaitan dengan pengadilan dimana pernyataan kisah dari korban dan pelaku menjadi dasar penentuan akibat hukum. IPT65 sendiri menyajikan testimoni baik berupa rekaman video hingga menghadirkan beberapa saksi pada saat sidang berlangsung yaitu 7 saksi langsung, 6 saksi ahli berasal dari peneliti yang membawahi tuntutan tertentu, dan 1 saksi ahli dalam bidang pembuatan film dokumenter. IPT65 memiliki beberapa media resmi untuk memberikan informasi terkait peristiwa 1965 maupun usaha yang dilakukan oleh IPT65 sendiri. Media tersebut yaitu situs resmi dari IPT65 berupa halaman web ([tribunal65.org](http://tribunal65.org)), halaman Facebook, Twitter (@IPT65), Flickr, maupun Youtube.

Strategi kedua yaitu *symbolic politic* dengan melihat *framing* yang dilakukan oleh IPT65. *Framing* yang dilakukan lebih banyak pada berbagai kegiatan yang dilakukan baik oleh IPT65 sendiri ataupun bekerjasama dengan organisasi ataupun institusi lainnya. Kegiatan tersebut lebih banyak berupa kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan peristiwa 1965 yang terdapat pelanggaran HAM. Kegiatan tersebut dengan mengadakan seminar di Jerman,



Den Haag, Amsterdam, dan Paris, mengikuti konferensi internasional dan menjadi salah satu pembicara di Austria yang diadakan EUROSEAS, *workshop* tentang peristiwa tahun 1965 di Universitas Bonn, kerjasama dengan Watch Indonesia mengadakan kegiatan bertajuk “50 Years after 1965” di Belin, diskusi panel dan *talkshow* dalam festival film, merangkul beberapa tokoh penting baik agama seperti NU yang menghasilkan halaqah dengan korban 1965 atau tokoh penting lainnya, bekerjasama dengan organisasi atau institusi lainnya yang bergerak di bidang HAM dan korban 1965 seperti KONTRAS dan lain sebagainya, serta bekerjasama dengan media seperti Kompas untuk memberitakan adanya pengadilan rakyat internasional ini.

Strategi ketiga yaitu *leverage politic* dengan melihat kedua komponenennya yaitu *material leverage* maupun *moral leverage*. Dari segi *material leverage* tidak terdapat usaha IPT65 untuk memotong anggaran yang menjadi sumber masalah karena peristiwa yang terjadi pada masa lalu sehingga indikator *material leverage* tidak berlaku. Sedangkan indikator *moral leverage* dengan cara memobilisasi dukungan internasional terhadap kasus 1965 ini. Hal tersebut dilakukan dengan menghubungi kementrian luar negeri Belanda dan organisasi-organisasi hak asasi manusia di Belanda yang telah menunjukkan ketertarikannya akan isu pelanggaran HAM di Indonesia, seperti Amnesty International dan Tapol (London), mengirimkan surat ke advokat HAM terkemuka seperti Jimmy Carter dan Desmond Tutu, dan pengiriman surat pendukung yang ditujukan kepada senator Amerika Serikat Tom Udall tentang pengajuan resolusi sidang ke-113 Kongres Amerika Serikat mengenai perlunya

rekonsiliasi di Indonesia dan pengungkapan pemerintah Amerika Serikat tentang peristiwa pelanggaran HAM 1965.

Dan yang terakhir strategi *accountability politics* dalam melihat kepatuhan aktor melakukan kebijakan dengan adanya dukungan aktor yang lebih kuat. Banyaknya dukungan yang diterima oleh *International People's Tribunal* (IPT65) ini dan adanya desakan terkait kasus pelanggaran HAM 1965 di Indonesia, menyebabkan munculnya tekanan bagi pemerintah Indonesia. Dari sini kemudian pemerintah menyelenggarakan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 yang diadakan 18-19 April 2016 di Jakarta. Adapun peserta yang turut hadir dalam simposium tersebut adalah kementerian/lembaga, individu, organisasi masyarakat, partai politik, perwakilan dari universitas, dan perwakilan media.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang ditujukan oleh penulis yaitu perlu penelitian lebih lanjut mengenai upaya penegakan hak asasi manusia terkait isu pelanggaran HAM tahun 1965 dari perspektif teori atau konsep lain yang lebih menjelaskan tindakan Indonesia, serta penelitian mengenai perspektif negara lain mengenai pelanggaran hak asasi manusia tahun 1965 di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baron, David P. *Private Politics*. Journal of Economics & Management Strategy Volume 12. (Issue 1, 2003)
- BBC Indonesia. “Peristiwa G30S 1965, penumpasan PKI, dan hari-hari sesudahnya”. BBC Indonesia, 30 September 2017. (Online) diakses pada 25 November 2017 <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41451322>CIA. *The Communist Party Of Indonesia*
- CIA, *The Communist Party Of Indonesia*. 1999.
- CIA, *Research Study: Indonesia – 1965 The Coup That Backfired*. 1968.
- Cribb, Robert. *Genocide in Indonesia. 1965-1966*
- \_\_\_\_\_, Robert. 2009. *The Indonesian Massacres. From Century of Genocide*. 3<sup>rd</sup> Edition. Taylor and Francis Inc.
- Efimova, Larisa M. And Ruth T. MCVey. 2011. *Stalin and The New Program For The Communist Party of Indonesia*. Cornell University: Southeast Asia Program Publications.
- International People’s Tribunal 1965. “*Apa itu IPT 1965?*”. (Online) diakses pada 20 November 2017 melalui <http://www.tribunal1965.org/apa-itu-ipt-1965/>
- \_\_\_\_\_. “*Narrative Report of the IPT1965*”. (Online) diakses pada 1 Desember 2017 <http://www.tribunal1965.org/en/narrative-report-of-the-ipt-1965/>
- Keck, Margaret dan Kathryn Sikkink. 1999. *Transnational advocacy networks in international and regional politics*. Oxford : Blackwell Publishers
- KontraS, *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian*. 2012.
- Lensa Indonesia. “*G30S Pembantaian Masal 1965-1966*”. (Online) diakses pada 16 Juni 2017 <http://www.lensaIndonesia.com/2012/07/30/inilah-detik-detik-pembantaian-massal-1965-1966.html>
- Pasuhuk, Hendra. “*Waktu Tau Saya Anak Aidit , Teman Saya Lari* “. DW, 19 Desember 2014. (Online) Diakses pada 1 Desember 2017

<http://www.dw.com/id/waktu-tau-saya-anak-aidit-teman-saya-lari/a-18139880>

- Puti, Parameswari. 2016. *Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace Detox Campaign on Fashion di Tiongkok*.
- Retta, Julia. *Consequences of the Arab Spring for Women's Political Participation*. Journal of Women and Human Rights in the Middle East: A Change Seasons For Arab Women? Issue 1. (Fall 2013). Rice University's Baker Institute.
- Roosa, John, Ayu Ratih & Hilmar Farid, *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*
- Sarwanto, Abi dan Prima Gumilang. "Live: Simposium Nasional Tragedi 1965". CNN Indonesia, 18 April 2016. (Online) Diakses pada 1 Desember 2017 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160418085757-20-124594/live-symposium-nasional-tragedi-1965/>
- Sukanta, Putu Oka. *Breaking The Silence: Survivors Speak About 1965-66 Violence in Indonesia*. 2014. Monash University.
- Suriyanto. "YPKP 65 Klaim 3 Juta Lebih Korban Tewas lantaran Dituduh PKI". CNN Indonesia, 30 September 2015. (Online) Diakses pada 29 November 2017 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150930054754-20-81729/ypkp-65-klaim-3-juta-lebih-korban-tewas-lantaran-dituduh-pki/>
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000. Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 2000.
- Untung, Bedjo. "Memori Sejarah dan Mengingat Kembali 1965 : dari Perspektif Korban". Abstraksi dari Konferensi Internasional Rekonsiliasi Sejarah Indonesia Dengan 1965: Fakta, Rumor & Stigma; 10-12 November 2016 di Universitas Goethe Frankfurt, Jerman. (27 November 2016). (Online) Diakses pada 25 November 2017 <http://ypkp1965.org/blog/2016/11/27/rekonstruksi-sejarah-indonesia-1965-dan-pelanggaran-negara/>
- Waluyo, Andylala. "VOA: Upaya Rekonsiliasi dalam Penyelesaian Tragedi 1965". VOA Indonesia, 30 September 2015. (Online) Diakses pada 25

November 2017. <https://www.voaindonesia.com/a/upaya-rekonsiliasi-dalam-penyelesaian-tragedi-65-/2985673.html>

Wardaya, Manunggal K. *International People's Tribunal 1965 dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Peristiwa 1965-1966*.

Wirantaprawira, Cyntha. 2005. *Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965: Mencari Keadilan*, Lembaga Persahabatan Jerman-Indonesia. Heidelberg RF Jerman.

